

**PERAN *ULEEBALANG* DALAM PENGUATAN SOSIAL
EKONOMI KERAJAAN ACEH DARUSSALAM (1873 – 1942)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

RITA ELLYANDA
NIM. 180501061

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
TAHUN 2022 M / 1443 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana S-1 dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam

Oleh

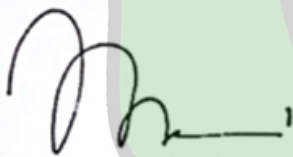
RITA ELLYANDA

NIM. 180501061

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam**

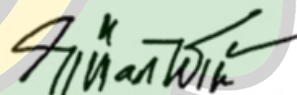
Disetujui untuk diuji/dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nur'aini A. Manan, M.Ag
NIP. 196307161994022001

Pembimbing II,



Hamdina Wahyuni, M.Ag
NUPN. 9920113058

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui oleh Ketua Prodi SKI



Sanusi, S. Ag., M. Hum
NIP. 197004161997031005

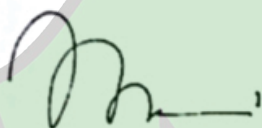
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
dan Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) di Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 27 Juli 2022
Di Darussalam Banda Aceh

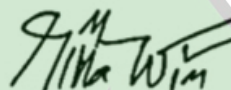
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Hj. Nur'aini A. Manan, M.Ag
NIP. 196307161994022001

Sekretaris



Hamdina Wahyuni, M.Ag
NUPN. 9920113058

Penguji I



Dra. Arfah Ibrahim, M.Ag
NIP. 196007931992032001

Penguji II



Dra. Munawiah, M.Hum
NIP. 196806181995032003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Fauzi Ismail, M.Si
NIP. 196805111994021001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum Wr, Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rita Ellyanda

NIM : 180501061

Prodi/Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)

Judul Skripsi : “Peran *Uleebalang* Dalam Penguatan Sosial Ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam (1873 – 1942)”.

Mengaku dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah asli karya sendiri, dan jika kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Banda Aceh, 27 Juli 2022

Yang menyatakan,



Rita Ellyanda
NIM. 180501061

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Peran Uleebalang dalam Penguatan Sosial Ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam (1873 – 1942)** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar S1 di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian tidak lupa shalawat beriring salam tidak lupa kita hantarkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta doa yang selalu teriring untuk para sahabat beliau yang memperjuangkan islam sehingga kita dapat merasakan nikmat yang saat ini yang ada dalam islam yang sangat luar biasa.

Penyusun karya ini berhasil dirampungkan berkat bantuan dari berbagai pihak. Dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kepada ibu Dr. Hj. Nur'aini A. Manan, M.Ag sebagai pembimbing I dan Hamdina Wahyuni, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya kepada dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam penulisan proposal skripsi ini

penulis merasa masih banyak kekurangan yaitu baik pada teknik penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatanskripsi ini.

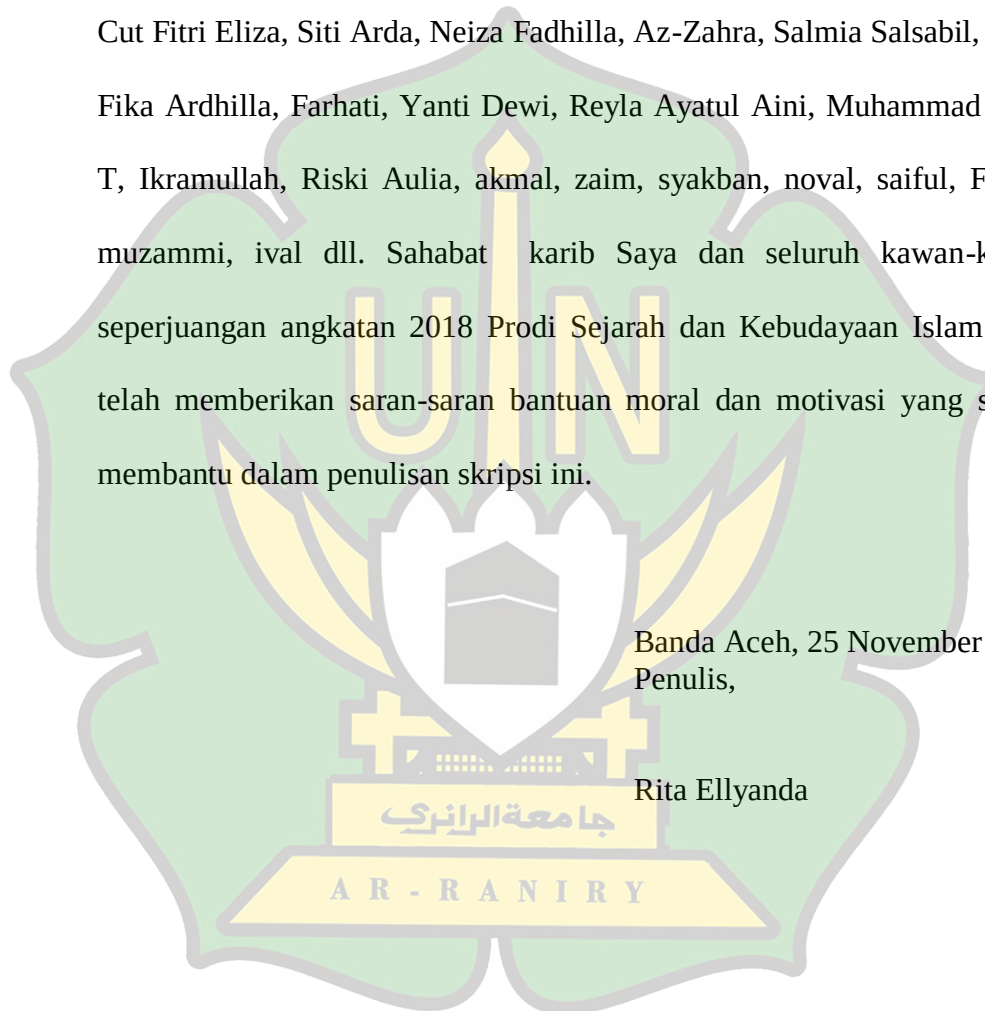
Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar- Raniry. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak lain. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Fauzi Ismail, M.Si. selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Sanusi, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Hj. Nur'aini A. Manan, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Hamdina Wahyuni, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dra. Arfah Ibrahim, M. Ag selaku penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Dra. Munawiyah, M.Hum selaku penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji demi kesempurnaan skripsi ini.

7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdullah dan Ibunda Ellyzar dan saudara kandung perempuan penulis Riska Ellyanda yang senantiasa memberi doa yang tulus, motivasi, dan kasih sayang.
8. Sahabat penulis yang telah menyemangati penulisan ini Intan Maulidar, Cut Fitri Eliza, Siti Arda, Neiza Fadhillah, Az-Zahra, Salmia Salsabil, Rosa, Fika Ardhilla, Farhati, Yanti Dewi, Reyla Ayatul Aini, Muhammad Rizal T, Ikramullah, Riski Aulia, akmal, zaim, syakban, noval, saiful, Fadhil, muzammi, ival dll. Sahabat karib Saya dan seluruh kawan-kawan seperjuangan angkatan 2018 Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah memberikan saran-saran bantuan moral dan motivasi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 25 November 2022
Penulis,

Rita Ellyanda



ABSTRAK

Nama : Rita Ellyanda
NIM : 180501061
Fakultas/Prodi : Fakultas Adab dan Humaniora
Judul : Peran *Uleebalang* dalam Penguatan Sosial Ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam (1873 – 1942).
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Dr.Hj. Nur'aini A. Manan, M.Ag
Pembimbing II : Hamdina Wahyuni, M.Ag

Kata Kunci: Peran, *Uleebalang*, Sosial Ekonomi, Aceh, Darussalam.

Uleebalang yang dianggap berhasil adalah *Uleebalang* yang bisa melindungi rakyatnya, dan *Uleebalang* yang pandai menjaga hubungan dengan orang tersebut akan mendapatkan banyak empati. Jumlah rakyat yang sangat besar merupakan keberhasilan bagi *Uleebalang*. *Uleebalang* sangat dihormati serta disengani oleh rakyatnya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh *Uleebalang* dalam penguatan bidang sosial dan ekonomi pada masa kerajaan Aceh Darussalam dan bagaimana peran *Uleebalang* dalam penguatan bidang sosial dan ekonomi pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Dengan menggunakan metode keperpustakaan (*library research*) dan penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa di Aceh, *Uleebalang* menjabat sebagai panglima tentara dan juga ditugaskan oleh penguasa Aceh untuk memimpin *nanggroe* atau negara. Dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan mereka ialah di ibaratkan sebagai “raja kecil” yang memerintah sebuah *Naggroe*, negara, *landschap*, atau kerajaankecil. *Uleebalang* menyandang gelar *teuku* (gelar untuk pria) dan *cut* (gelar untuk wanita), dan mereka dikenal sebagai *Uleebalang* dalam pemerintahan Mukim. *Uleebalang* bertugas sebagai pemungut *wasee* di pelabuhan wilayah kekuasaannya. Pemungutan bea ekspor dan impor *wasee*, mereka yang mengendalikan lalu lintas ekspor dan impor melalui jalan darat dan pelabuhan listrik, pajak irigasi, dan beberapa pajak tanah merupakan sumber pendapatan bagi *Uleebalang*. Partisipasi utama *Uleebalang* dalam perdagangan yang memperkuat status mereka di daerah. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa *Uleebalang* adalah bawahan sultan Aceh, diangkat untuk membantu tugas kesultanan. *Uleebalang* memiliki wilayah yang dikelola sendiri sehingga menjelma menjadi raja-raja kecil. Kekuasaan *Uleebalang* yang diperoleh secara turun temurun itu disebut *nanggroe* (negeri) dengan wilayah dan penduduk yang berbeda beda. *Uleebalang* memiliki wewenang untuk menjaga agama Islam dan menciptakan suasana kondusif.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN KASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	iv
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Sejarah	14
B. Teori Pemerintahan.....	17
C. Penguatan Sosial Ekonomi	26
 BAB III: ULEEBALANG PADA MASA KERAJAAN	
A. Sistem Pemerintahan <i>Uleebalang</i> Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam	31
B. Kondisi Ekonomi Sosial Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam.....	34
C. <i>Uleebalang</i> Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam.....	40
D. Pengaruh <i>Uleebalang</i> Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam ...	44
 BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
 DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Suasana Istana Kesultanan Aceh Pada Puncaknya Pada AbadXVII, Sistem Perpajakan Dan Keuangan Kerajaan Aceh Darussalam	18
Gambar 2.2.Stempel Cap <i>Sikureung</i> Kerajaan Aceh	24
Gambar 3.1. <i>Uleebalang</i> Penguasa Kecil Aceh Dari Masa Kesultanan Sampai Revolusi Sosial (1512-1946)	31
Gambar 3.2.Seorang <i>Uleebalang (Teuku)</i> Nja Gadang dan Istrinya (Cut) YangDitangkap di Aceh dalam Belenggu Karena Menentang Pemerintahan Kolonial Belanda	34
Gambar 3.3. Mata Uang Kesultanan Aceh Darussalam.....	35



DAFTAR TABEL

Table 3.1. <i>Uleebalang</i> di pantai barat selatan aceh yang menandatangani korteverklaring periode pertama.....	44
--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerajaan Aceh memiliki wilayah antara lain Pidie, Samudera Pase, Perlak, Tamiang, Gayo, Alas, Daerah Barat, Singkil, Tromon dan Barus. Wilayah-wilayah ini dulunya adalah wilayah yang sebelumnya pisah, tetapi mereka akhirnya ditaklukkan dan disatukan menjadi satu kerajaan yang kuat. Raja-raja yang ditaklukkan selanjutnya berdiri di bawah bendera Aceh Darussalam dan menerima *Cap Sikureung* (Stempel Kerajaan Aceh).

Nangroe adalah nama daerah yang lebih besar dari *Mukim* (Negeri). *Nangroe* terdiri dari sejumlah mukim di bawah pimpinan *Uleebalang*. Sultan Aceh memberikan wewenang langsung kepada *Uleebalang*. Mereka telah memegang kekuasaan disana dari generasi ke generasi. Tetapi ketika mereka menjabat sebagai pemimpin wilayah mereka, pengangkatan mereka harus disetujui oleh Sultan Aceh.¹ Pengangkatan harus memiliki stempel yang disebut dengan Stempel Kesultanan Aceh yaitu Stempel *Sikureung* (cap sembilan) atau Cap Halilintar.²

Dikarenakan perlunya seorang pemimpin tunggal, kemudian dipilihlah *Uleebalang* yang lebih kuat diantara mereka tetapi wewenang panglima *sagoe*

¹Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Atjeh Dalam Tahun 1550-1675*, (Medan : Monora, 1972), hlm. 89.

²Mengenai Asal-Usul Cap Stempel Kerajaan Aceh, BKI 59, hlm. 349.

terbatas pada kepentingan bersama.³Tugas dari *Uleebalang* ialah membimbing *nganggroe* dan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan tenaga-tenaga tempur disaat terjadinya sebuah peperangan.Mereka juga menjalankan perintah dari Sultan Aceh, tetapi mereka jugamenjadiseorang pemimpin yang kuat di wilayah mereka sendiri.

Uleebalang dianggap berhasil adalah *Uleebalang* yang bisa melindungi rakyatnya, dan*Uleebalang* yang pandai menjaga hubungan dengan orang tersebut akan mendapatkan banyak empati. Jumlah rakyat yang sangat besar merupakan keberhasilan bagi *Uleebalang*.*Uleebalang* sangat dihormati serta disengani oleh rakyatnya.Hal ini misalnya, jikaseorang masyarakat mengadakan sebuah kenduri atau acara acara rakyat lainnya mereka sangat ingin dihadiri oleh *Uleebalang*, dan Aceh kaya akan kenduri salah satunya kenduri blang, dan *Uleebalang*tersebut merupakantamu yang sangat istimewa di acara kenduri tersebut.⁴

“Jika orang luar dari Aceh datang untuk menuntut ilmu di tiga sagi Aceh dan duduk di masjid, Zawiya atau Madrasah, kiranya akan dianiaya sampai mati, maka *Uleebalang* yang memiliki tempat pemerintahan sebagai ahli warisnya, akan menuntut pembelaan terhadap kematian dan menyelesaikan kematiannya dengan pesta tingkatnya, Raja tidak mengganggu ini, karena dia tidak muncul di hadapan Raja, tetapi mengikuti aturan dari *Uleebalang*.⁵

Upaya mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat Aceh boleh dikatakan sebagai pribadi yang taat kepada pemimpinnya. Kedekatan yang terjalin

³Muhammad Ibrahim, *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta, 1991), hlm. 77

⁴LK. Ara, *Ensiklopedi Aceh: Adat Hikayat dan Sastra*, (Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih, 2008), hlm. 197.

⁵A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 227.

Uleebalang tidak lantas mereka meremehkan atau bahkan membangkang sang pemimpin. Sebaliknya, kedekatan yang semakin intens dimanfaatkan sebagai sarana untuk merajut visi dalam mengapai cita-cita, utamanya adalah meledakkan energy kolektif mengusir bangsa penjajahan. Bila seseorang sedang duduk di pinggir jalan raya dan melihat *uleebalangnya* lewat didepannya, mereka akan menunjukkan sikap hormat dengan penuh takzim. *Uleebalang* bukanlah sosok penguasa yang zalim, bagi penduduk meraka adalah penguasa yang bersungguh-sungguh mengusahakan kepentingan bersama.

Selama monarki Aceh, terutama selama pemerintahan pusat yang kuat, pelabuhan Aceh Darussalam adalah satu-satunya pelabuhan ekspor di kawasan itu. Pedagang asing tidak diperbolehkan melakukan kontak langsung dengan *Uleebalang* setempat atau masyarakat umum di luar Bandar Aceh tanpa izin terlebih dahulu dari Sultan. Sistem pemerintahan pusat begitu kuat sehingga bagi hasil dalam negeri bahkan dari wilayah *Uleebalang* harus terlebih dahulu diangkut ke pemerintahan pusat Bandar Aceh Darussalam.⁶

Uleebalang dan ulama selalu menjadi topik penelitian dari beberapa jurnal tetapi penulis lebih meneliti mengenai *Uleebalang* dari pada ulama, kajian ini berbeda dengan penelitian yang lain dikarenakan penulis lebih memfokuskan tugas *Uleebalang*, misalnya skripsi Nur Agustiningsih penelitian ini menjelaskan konflik *Uleebalang* dengan ulama dan beberapa kejadian-kejadian dengan ulama. Dalam kajian ini penulis meneliti mengenai peran *Uleebalang* dalam penguatan

⁶Sudirman, *Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Iternasional 1500-18*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional, 2009), hlm. 147.

sosial ekonomi apapun yang dilakukan *Uleebalang* dalam penguatan sosial ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam.

Pengaruh *Uleebalang* terhadap masyarakat contohnya pertanian, dan ambisi ekonomi untuk menggunakan lahan untuk perkebunan baru. Lahan yang tidak terpakai umumnya dianggap sebagai rezeki bagi *Uleebalang*, sehingga *Uleebalang* jarang mengarah dan memperhatikan kepentingan rakyat. Mereka sibuk berdagang dan juga mengurus sawah dan ladang lada. Rakyat hanya terbatas pada hubungan antara pemasok modal dan peminjam, atau antara pemilik tanah dan penyewa atau petani penggarap dan petani atau antara petani dengan penjual.

Kondisi tersebut menjadi tolak belakang antara kepemimpinan yang benar dengan yang tidak itu semua disesuaikan dengan pemerintahan *Uleebalang* tersendiri disini penulis tertarik meneliti penelitian ini sebagai kepemimpinan daerah yang kurang strategis. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi alasan utama penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran *Uleebalang* dalam Penguatan Sosial Ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam (1873 – 1942)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Uleebalang* dalam penguatan bidang sosial dan ekonomi pada masa kerajaan Aceh Darussalam?
2. Bagaimana peran *Uleebalang* dalam penguatan sosial dan ekonomi pada masa kerajaan Aceh Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Uleebalang* dalam penguatan bidang sosial dan ekonomi pada masa kerajaan Aceh Darussalam.
2. Untuk mengetahui peran *Uleebalang* dalam penguatan sosial dan ekonomi pada masa kerajaan Aceh Darussalam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman ilmiah, menambah referensi atau bahan bacaan dan menjadi informasi tentang kekuasaan *Uleebalang* serta faktor ekonomi rakyat semasa *Uleebalang* memegang wewenangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri tentang sistem pemerintahan keberlakuan kepemimpinan *sagoe* (sagi) dan bagaimana keadaan rakyat dengan adanya pemimpin yang disebut *Uleebalang*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat dikalangan masyarakat, para pelajar, pemerintah, sehingga di kemudian hari lebih banyak orang mengetahui tentang faktor ekonomi rakyat maupun kerajaan Aceh terdahulu mengenai kepemimpinan

suatu daerah serta dari beberapa kemukiman yang dipegang kepemimpinan oleh *Uleebalang*.

E. Penjelasan Istilah

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan, ada kalanya para pembaca dapat mengalami kesalahpahaman dalam mengartikan beberapa kata tersirat di dalam penelitian ini, maka dari itu beberapa istilah akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran

Istilah peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna karena mewakili kumpulan tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Peran adalah beberapa tugas terpenting yang harus diselesaikan.⁷ Menurut penulis peran memiliki makna yaitu ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan, peranan tanpa kedudukan

2. *Uleebalang*

Uleebalang merupakan kepala tentara, kepala wilayah nasional yang signifikan, gelar *Uleebalang* diberikan kepada para sultan besar dan raja-raja yang berkuasa di wilayah kesultanan itu sendiri atau seluruh bangsa di masa lalu. *Ulee* berarti kepala sesuatu yang berada di atas, hulu, pemimpin.⁸ *Uleebalang* dalam bahasa Aceh setara dengan *hulubalang* dalam bahasa Indonesia. *Uleebalang* adalah gelar penguasa daerah dalam masyarakat Aceh yang dianggap mulia. Buku Snouck

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 845.

⁸ Aboe Bakar, dkk, *Kamus Aceh Indonesia 2*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985, Cet 2), hlm. 1035.

Hurgronje Aceh di Mata Kolonial juga menyebutkan *Uleebalang* sebagai orang yang dibimbing di negaranya sendiri dan merupakan kepala daerah. Menurut penulis uleebalang sebagai pemimpin di suatu daerah untuk mengatur segala keperluan kehidupan masyarakat wilayah kekuasaannya apapun masalah yang terjadi di daerah tersebut harus diselesaikan oleh uleebalang dan juga acara-acara yang diadakan ditempat tersebut harus ada persetujuan dari uleebalang.

3. Sosial Ekonomi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, sosial merupakan sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.⁹ Sosial memiliki banyak definisi yang dianggap gagasan, seperti yang berkaitan dengan sikap, orientasi, atau tindakan yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan orang lain. Penulis mengkaji perilaku sosial orang-orang terkemuka sebagai pemimpin dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ekonomi sebagai “ilmu yang berhubungan tentang prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan barang dan kekayaan” (harta, industri, dan perdagangan). Penggunaan uang, tenaga, waktu, dll. Ekonomi kehidupan (negara), keuangan rumah tangga (instansi pemerintah).¹⁰

Ekonomi adalah ilmu tentang tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan ekonomi juga harus diikuti dengan peningkatan kepentingan masyarakat sebagai tujuan ekonomi. Menurut pendapat

⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 892.

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 845.

ahli yaitu Aristoteles, ekonomi adalah memiliki penggunaan ganda dari potensi penggunaan dan potensi pertukaran barang (nilai pakai dan nilai pertukaran).

Meurut penulis sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi. Sosial ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui upaya-upaya untuk mengangkat manusia dari keterbelakangan menuju kesejahteraan.

5. Kerajaan Aceh Darussalam

Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang terletak di ujung pulau Sumatera, paling tepatnya di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang bercorak maritime yang letak di pesisir pantai letak geografis Aceh yang sangat strategis dalam jaringan perdagangan internasional.¹¹

F. Kajian Pustaka

Buku yang membantu penulisan ini buku *Uleebalang* dari kesultanan hingga revolusi sosial (1514-1946), tulisan Hasbullah dan diperbanyak oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, buku ini menjelaskan mengenai pemerintahan *Uleebalang* serta masalah-masalah yang menyangkut dengan *Uleebalang*.¹²

¹¹Teuku Ibrahim Alfian mengatakan bahwa sampai abad ke-XIX Madimata Al-Sultan Al-Asyi Al-Kubra Bandar Aceh Darussalam adalah ibukota kerajaan Aceh Darussalam. Lihat Teuku Ibrahim Alfian, "Banda Aceh Sebagai Pusat Awal Perang di Jalan Allah". dalam *Kota Banda Aceh Hampir 1000 Tahun*, (Banda Aceh: Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, 1988), hlm. 26.

¹² Hasbullah, *Uleebalang: Dari Ke Sultanat Hingga Revolusi Sosial*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2015), hlm. 6.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis buku yang juga mendukung penulisan ini ialah *Aceh (Di Mata Kolonialis)* tulisan dari Snouck Hurgronje buku ini diperbanyak oleh Badan Arsip Perpustakaan Aceh. Buku ini menjelaskan mengenai keadaan rakyat Aceh serta peran *Uleebalang* sebagai kepemimpinan dalam masyarakat.¹³

Buku yang membantu karya ilmiah mengenai peran *Uleebalang* antara lain *59 tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu* tulisan A. Hasjmy yang menjelaskan peraturan-peraturan di dalam Negeri Aceh Bandar Darussalam dan pengangkatan panglima sagi dan *Uleebalang* sementara penulis lebih memfokuskan pada sistem sosial dan ekonomi terhadap Kerajaan Aceh Darussalam.¹⁴

Buku *Aceh* karangan H. C. Zentgraaff adalah seorang wartawan perang menjelaskan tugas-tugas *Uleebalang* buku ini juga mengutarakan watak orang Aceh dan juga ada kutipan tulisan Snouck Hurgronje.¹⁵

Buku *dari Aceh ke pemersatauan Bangsa* tulisan dari Teuku Mohammad isa didalam buku ini memaparkan mengenai *Uleebalang* antara lain: Pergaulan dengan *Uleebalang*, kesibukan sehari-hari *Uleebalang* dan meramalkan *Uleebalang* Aceh akan punah meskipun buku ini banyak mengutarakan mengenai

¹³Snouck Hurgronje, *Aceh: di Mata Kolonialis*, (Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2014), hlm. 99-137.

¹⁴A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 227.

¹⁵H. C. Zentgraaff, *Aceh*, (Jakarta Pusat: Beuna, 1983).

Uleebalang hanya saja penulis lebih mengutamakan *Uleebalang* dalam ekonomi dan sosial.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang secara sistematis untuk meneliti masalah tertentu dengan maksud memperoleh data atau informasi sebagai jawaban atas masalah yang sedang diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah.

a. Metode Sejarah

Metode sejarah adalah suatu sistem atau metodologi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Metode sejarah dapat didefinisikan sebagai metode atau teknik yang sistematis berdasarkan ide dan kriteria ilmu sejarah. Pengumpulan data penelitian sejarah diperoleh dalam empat langkah¹⁸, yaitu sebagai berikut :

1. Heuristik (pengumpulan data)

Heuristik adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan dari beberapa dokumen, buku, jurnal, lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena mencari informasi lebih lanjut berdasarkan fakta, mengenai hal yang diteliti. Akibatnya, tujuan metode deskriptif adalah untuk

¹⁶Teuku Mohammad Isa, *Dari Aceh Ke Pemersatuan Bangsa*, (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 1999), hlm. 56.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Research & Devolement*, (Bandung: Alfateba, 2011), hlm. 2.

¹⁸Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2007), hlm 14.

menggambarkan gambar suatu masyarakat atau fenomena sosial tertentu untuk memperoleh informasi tentang *Uleebalang* penulis memerlukan membaca dengan teliti mengenai *Uleebalang* dikarenakan kurangnya buku primer mengenai *Uleebalang*.

Data primer adalah suatu informasi yang didapatkan langsung melalui sumbernya, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini meliputi informasi yang diperoleh di lapangan. Sumber utama dalam penelitian ini berupa buku *Uleebalang* dari kesultanan hingga Revolusi sosial (1514-1946) karya Hasbullah.

Data sekunder disebut juga sebagai data pendukung yang disebut sebagai sumber penulis dan dapat digolongkan sebagai sumber buku, sumber data arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dan sumber data arsip yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Beberapa artikel serta buku buku lainnya dari beberapa perpustakaan seperti pustaka UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah, Perpustakaan Adab dn Humaniora, Perpustakaan ICAIOS, Perpustakaan Ustaka PDIA dan BPNB.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan verifikasi sumber yaitu pengujian kebenaran atau ketetapan dari sumber sejarah melakukan penelitian (kritik) terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan Kritik sumber ada dua internal dan eksternal,¹⁹ tetapi yang penulis gunakan adalah kritik internal yaitu dengan membandingkan beberapa buku serta jurnal. setelah data terkumpul maka penulis memeriksa

¹⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1998), hlm. 126.

kebenaran sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian baik dari segi isi dan korelasi dengan peristiwa sejarah, penulis tidak mengambil secara keseluruhan, setiap informasi yang penulis dapatkan dari berbagai literatur akan diambil jika dianggap mendekati dengan peristiwa yang terjadi guna melengkapi penelitian ini, penulis harus mengkaji dengan keakuratan data yang ditulis oleh sejarawan agar dapat dijadikan sebagai bukti dalam penelitian sejarah.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran fakta sejarah yang dirangkai menjadi kesatuan yang masuk akal agar mempunyai bentuk Struktur. Dalam proses penafsiran sejarah ini peneliti diharuskan agar mencapai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa.²⁰ sumber yang diperoleh untuk menentukan seberapa jauh hubungan antara data dan fakta, mengenai peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan pada waktu *Uleebalang* sebagai kepala daerah dan tugas *Uleebalang* dalam sosial dan ekonomi. Oleh karena itu penulis dapat mengambil kesimpulan dari peristiwa sejarah dan peninggalan sejarah.

4. Historiografi

Historiografi adalah metode penulisan, penyajian, dan pelaporan hasil studi sejarah yang dilakukan, sedangkan sejarah adalah metode penulisan, penyajian, dan pelaporan hasil studi sejarah yang dilakukan. Tahap ini dilakukan dengan menyusun fakta sejarah setelah melakukan penelusuran sumber, pengkajian sumber, dan interpretasi, kemudian dituangkan secara tertulis ke dalam cerita sejarah dalam bentuk tulisan. Metode historiografi menfokuskan pada

²⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar...*, hlm, 7.

masa lalu serta bukti-bukti sejarah seperti arsip-arsip, serta hasil dokumentasi serta tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai-nilai sejarah.

H. Sistematika Penulisan

Penulis memberikan sistematika pembahasan lima bab dalam skripsi ini; Sistematika pembahasan ini merupakan satu kesatuan yang utuh untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi dan memberikan kemudahan bagi pembaca untuk lebih memahami karya ini. Yaitu terdiri dari:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, bab ini juga memuat rumusan masalah yang disajikan dalam beberapa pertanyaan, kemudian bab ini disertakan juga tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua penulis menyajikan landasan teori sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Bab ini memuat uraian tentang peran *Uleebalang* dalam ekonomi dan sosial serta kegiatan-kegiatannya, teori pemerintahan dan penguatan sosial ekonomi.

Bab Ketiga penulis menguraikan tentang peran *Uleebalang* dalam Kerajaan Aceh Darussalam serta sistem pemerintahan dalam memimpin wilayah dan kondisi ekonomi sosial, peran *Uleebalang* dan pengaruh *Uleebalang* pada masa Kerajaan Aceh.

Bab Keempat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang penulis kemukakan. Kemudian disertai

dengan saran atau kritik agar menjadi masukan untuk semua pihak terutama terhadap penulis sendiri.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Sejarah

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, teori adalah hukum dan asas-asas yang menjadi dasar dalam suatu ilmu pengetahuan. Teori adalah bagian yang terpenting untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah penelitian, untuk itu diperlukan teori tertentu sesuai dengan objek kajiannya. Seperti penelitian terhadap sejarah maka dibutuhkan teori penelitian sejarah.

Sejarah dapat diartikan sebagai silsilah, asal-usul, peristiwa, atau peristiwa sejarah yang sebenarnya. Dalam bahasa Arab sejarah disebut *tarikh*, yang berarti menulis atau catatan pengetahuan tentang waktu atau peristiwa serta sebab-sebab terjadinya peristiwa,²¹ sedangkan sejarah menurut istilah mengacu pada sesuatu yang terjadi di masa lalu.

Penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Penulisan sejarah yang menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi dan mencirikan peristiwa tersebut sebagai suatu proses yang termasuk dalam uraian analisis dikenal sebagai analisis sejarah.²² Perkembangan peristiwa termasuk fakta tentang apa, siapa, mengapa, dimana, dan bagaimana. Untuk menjawab pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi, kemudian menyusun hubungan antara sebab, akibat, dan motivasi secara kronologis sebagai kompleksitas peristiwa.

²¹ Biyanto, *Teori Siklus Peradaban*, (Surabaya: LPAM, 2004), hlm. 14.

²² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 32.

Kejadian pada masa lampau tersebut diabadikan dalam laporan-laporan tulisan didalam ruang lingkup sebagai pengalaman yang sangat penting. Pendapat lain mnengenai sejarah yaitu kata *syajarah* yang artinya pohon. Ungkapan *syajarah* umumnya terkait dengan istilah *syajarah al-nasab*, yang berarti "riwayat keluarga". Riwayat keluarga adalah garis keturunan yang mencakup daftar silsilah keluarga.²³

Sayyid Quthub mengatakan bahwa sejarah bukanlah peristiwa-peristiwa, akan tetapi sejarah ialah tafsiran-tafsiran tentang peristiwa mengenai hubungan yang nyata dan tidak nyata, dan memberikan dinamisme dalam kaitan waktu dan tempatnya.²⁴ Peristiwa sejarah terjadi satu kali dan tidak terulang kejadian itu sama persis dengan kejadian sebelumnya dari berbagai kejadian sejarah informasi sejarah dapat di peroleh berdasarkan wilayah (geografis), kurun waktu (kronologis), negara (nasional), suku bangsa (etnis), topik atau pokok Bahasa (topikal).²⁵

Sultan Ali Mughayat Syah mendirikan Kesultanan Aceh pada tahun 1496. Kerajaan Aceh didirikan di wilayah Kerajaan Lamuri dan kemudian menggabungkan semua kerajaan, termasuk Daya, Pedir, Lidie, dan Nakur. Setelah Sultan Ali Mughayat Syah wafat pemerintahan dilanjutkan oleh para sultan secara

²³Misri A. Muchsin, *Filsafat Sejarah Dalam Islam*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 17.

²⁴Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2001), hlm. 8.

²⁵Aam Abdillah, *Pengantar Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 19.

berturut-turut hingga sampai dengan sultan terakhir yaitu Sultan Muhammad Daud Syah pada tahun 1873-1903.

Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh sultan Ali Mughayat Syah.²⁶ Dalam perjalanan sejarah kerajaan ini berkuasa selama 389 tahun. Pendapat ini mengatakan dimulai pada tahun 1514 s/d 1903 dan diperintah oleh 31 orang sultan/sultanah.²⁷ Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah muncul dan berkuasa di Nusantara, dan masuk dalam lima kerajaan besar di dunia Islam setelah Kerajaan Islam Turki Usmani, Kerajaan Islam Maroko, Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, Kerajaan Islam Agra di Anak Benua India.²⁸

Sultan Iskandar Muda yang berhasil mengantarkan Kerajaan Aceh Darussalam pada puncak kejayaan dan kemashurannya, sultan ke-12 memerintah pada tahun 1607-1636. Berbagai bidang kemajuan telah dicapai diantaranya: bidang politik, ekonomi, militer, pendidikan, agama, dan sosial budaya. Bandar Aceh Darussalam menjadi sebuah bandar dagang internasional yang didatangi oleh para pedagang dari berbagai kebangsaan dalam bidang ekonomi, seperti dari Asia barat, Asia Tenggara, Asia Tengah, Eropa, dan dari Kepulauan-kepulauan Nusantara itu sendiri.

²⁶ Berdasarkan penelitian R.A Husein Djajaadiningrat, terhadap batu nisan di Kandang XII dan Kampong Pande, ia menyimpulkan bahwa kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1514. Lihat R.A Husein Djajaadiningrat, "Critisch Overzicht Van De In Maleische Werken Vervatte Gegevens Over De Geschiedenis Van Het Soeltanaat Van Atjeh", dalam *BKI* 65, 1911, hlm. 213.

²⁷ K.F.H. Van Lange, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, Alih Bahasa: Aboe Bakar, pusat Dokumentasi dan informasi Aceh, (Banda Aceh, 2002), hlm. 91-93.

²⁸ Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 99.

Dalam sejarahnya, Aceh menentang imperialisme bangsa eropa. Pemerintahan terus diatur dengan strategis dan sistem pendidikan militer terus dikembangkan dan juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain seperti Turki Ustmani.²⁹ Sejak berdirinya kerajaan di Aceh hubungan perdagangan dan diplomatik tersebut telah terjalin dari awal. Hubungan tersebut memberi keuntungan kepada kedua belah pihak, untuk pihak asing menguntungkan karena mereka dapat membawa rempah-rempah yang ada di Aceh untuk dibawa ke negara mereka. Dan juga sebaliknya bagi pihak Aceh juga sangat menguntungkan karena dapat mempelajari tentang sistem perdagangan yang modern.

B. Teori Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata Yunani "*kubernan*", yang berarti "kapten kapal". Orang lain percaya bahwa pemerintah berasal dari kata "perintah". Istilah perintah mengandung empat elemen. *Pertama*, ada dua pihak yang terikat satu sama lain. *Kedua*, kedua belah pihak memiliki hubungan kontraktual. *Ketiga*, partai yang berkuasa memiliki otoritas. *Keempat*, pihak yang dikuasai adalah penurut.³⁰

²⁹ Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 476.

³⁰ Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, (Malang: UB Press, cetakan pertama 2018), hlm. 2.



Gambar 2.1. Merupakan suasana Istana Kesultanan Aceh pada puncaknya pada abad XVII, sistem perpajakan dan keuangan kerajaan Aceh Darussalam. (Sumber Tengkuputeh.wordpress.com)

Penerapan syariat Islam sebagai landasan sosial dan politik masyarakat Aceh menunjukkan peradaban mereka yang jauh berbeda dengan negara lain. Islam telah digunakan sebagai ideologi negara sejak berdirinya Kerajaan Aceh, di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, sistem pemerintahan yang mengikuti model Kerajaan Islam Timur Tengah. Misalnya Menteri dikenal sebagai Wazir, ketua Mahkamah Agung dikenal sebagai Qadhi Maikul Adil, menteri keuangan dikenal sebagai Wazir Dirham, dan perbendaharaan negara dikenal sebagai Baitul Mal.³¹

Iskandar Muda telah berhasil membawa Kerajaan Aceh ke masa keemasan dan kejayaan. Kerajaan Aceh sudah menguasai sebagian besar Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan sebagian Malaysia. Pemerintah terorganisir dengan baik dan sistem perdagangan dan hubungan eksternal sangat teratur. Pembagian kekuasaan

³¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*, (Bandung, Mizan 1994), hlm. 166-189.

antara demokrasi pemerintahan dan badan-badan pemerintahan yang berbeda dan distribusi kekuasaan sosial dalam masyarakat menyebabkan Iskandar muda dapat memerintahan dengan aman.

Iskandar Muda adalah seorang raja yang mengikuti hukum negaranya. Hal ini ditunjukkan dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada anak kandungnya sendiri karena melanggar hukum.³²

Berikut merupakan badan-badan pemerintahan masa sultan di Aceh, instansi pemerintahan sultan mungkin terlihat era yang berbeda, antaranya:

- a. Balai Rong Sari, sebuah lembaga yang dikelola sultan, terdiri dari empat *Uleebalang* dan tujuh ulama. Lembaga ini bertanggung jawab atas perencanaan dan persiapan penelitian.
- b. Balai Sidang Mahkamah Rakyat, yang beranggotakan tujuh puluh tiga orang dan saat ini berbentuk majelis rakyat, merupakan lembaga yang dipimpin oleh Kadli Maiikul Adil.
- c. Balai Gading adalah sebuah lembaga yang dipimpin oleh wazir mu'adhdham, seorang laksamana kaya dan perdana menteri seri, yang berpusat pada dewan menteri atau kabinet saat ini dan berisi sembilan anggota pengadilan orang terpelajar.

³²Peristiwa ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut karena kemungkinan ada unsur politik, dan pemuda Iskandar bernama Meurah Pupok menjadi korban akibat inspirasi politik ini. Besar kemungkinan Iskandar Thani, keponakan Putri Phang (istri Iskandar Muda), berkeinginan menjadi sultan untuk melakukan persekongkolan politik, karena jika Meurah Pupok masih hidup, maka sultan dengan sendirinya akan mewariskannya saat Iskandar Muda meninggal.

- d. Balai Admiral adalah sebuah lembaga yang mengurus masalah-masalah yang menyentuh jajaran perang, dipimpin oleh seorang wazir bergelar laksamana amirul harb, dan terletak di dekat Kementerian Pertahanan.
- e. Balai Majlis Mahkamah, adalah badan pengatur pekerjaan/pengadilan yang dipimpin oleh seorang wazir bergelar Seri Raja Panglima Wazir Mizan, atau Departemen Kehakiman.

Landasan ideologi Kerajaan Aceh adalah Islam, menurut Qanun Al-asyi (Qanun Syarak Kerajaan Aceh), dengan sumber hukum adalah Al-Qur'an (firman Allah) dan Al-Hadits: ijma' ulama dan Qiyas.³³ Kerajaan Aceh Darussalam menerapkan teori pemerintahan monarki (kerajaan), Struktur Pemerintahan di antara beberapa jenis monarki (kerajaan) adalah: Monarki Absolut, pemerintahan suatu negara yang dipimpin oleh seorang (raja, ratu, atau kaisar) dengan kekuasaan tidak terbatas. Monarki konstitusional adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi.

Pemerintahan kerajaan dalam lembaga perdagangan dan keuangan:

1. Balai Baitul Mal

Fungsi dari lembaga ini ialah sebagai badan pengelolaan keuangan negara dan menyalurkan dana amal dibawah bimbingan Bendahara Raja Wazir Derham.

Sumber dana Baitul Mal adalah:

³³ A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), hlm.69.atau A. Hasjmy, *Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam*, (Jakarta:Bulan Bintang), hlm. 72. Ijma 'ulama adalah kesepakatan (konsensus) yang dicapai oleh para mujtahid umat Islam pada saat Nabi SAW tidak ada. Melanggar hukum syar'i tentang suatu kejadian. Sedangkan qiyas digunakan untuk membandingkan suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan yang pasti dalam nash (Al-Qur'an dan hadits) dengan suatu peristiwa dengan ketentuan dalam tulisan. A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1977), hlm. 133-134.

- a. Zakat, sedekah dan Wakaf.
- b. Jizyah, pajak atas perlindungan bagi orang non- muslim.
- c. Kharraj, pajak penghasilan hasil bumi dari non-muslim
- d. Asyur (bea-cukai)
- e. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan kerajaan.³⁴

2. Balai Furdhah

Balai furdhah adalah jenis kementrian perdagangan yang dipimpin oleh seorang menteri seri paduka wazir perniagaan. Sultan memperkerjakan sejumlah pegawai pada balai furdhah untuk menjamin pemungutan bea cukai dan pengawasan pelabuhan, balai furdaha ditempatkan di bawah kekuasaan orang kaya Sri Maharaja lela dan penghulu kawal, pegawai sipil dan militer dibantu oleh *Kartkun* (juru tulis) dan *Syahbandar*(kepala pelabuhan).³⁵ Tugas utamanya mengutip pajak (bea cukai) dari keluar masuk kappa-kapal di pelabuhan Aceh.

3. Syahbandar

Syahbandar berkedudukan dalam pemerintahan Kerajaan Aceh membantu raja di bidang pelabuhan. Jabatan syahbandar diangkat oleh raja biasanya syahbandar diangkat dari kalangan pelabuhan diserahkan kepada raja, kemudian diserahkan ke baitul mal.³⁶

³⁴ Ali hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, ...hlm. 84.

³⁵ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda*, Terjemahan Arifin Winnarsih, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.149.

³⁶ Sudirman, *Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional 1500-1873*, (Banda Aceh : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2019), hlm.77.

4. Haria Peukan

Haria peukan merupakan hari peukan (pasar) terbentuknya haria peukan dikarenakan ketidakateraturan dalam pedagang, tugas berdagang lebih diutamakan dari pada ibadah melihat kejadian tersebut maka pemimpin agama dan penguasa menetapkan hari khusus untuk kegiatan dagang selain pada hari jumat.³⁷

5. Seneubok

Seneubok berasal darikata *Keubok*, artinya berkumpul di satu tempat (beberapa orang). *Seunebok* dapat dikatakan sebagai lokasi dimana masyarakat bekerjasama dalam pembukaan lahan dan kegiatan pertanian sesuai dengan peraturan adat yang berlaku.

Menurut El Hakimi *Seuneubok* adalah lahan lada yang luas sekitar 10 hektar dengan lebih dari 10 orang penggarap dan dikelola oleh seorang yang disebut dengan *Peutua* dan sekaligus majikan.³⁸ Dalam budidaya lada, *seuneubok* diartikan sebagai kompleks perkebunan lada yang menggabungkan 10 hingga 20 kebun lada atau lebih, dengan masing-masing kebun dikerjakan oleh 5 orang atau lebih, anggota *seuneubok* disebut *aneuk seuneubok*.³⁹

Selain itu terdapat bermacam pejabat tinggi kerajaan antara lain:

- a. Syahbandar, mengelola urusan perniagaan di pelabuhan.
- b. Teuku kadhi malikul yang Adil, semacam hakim Agung.

³⁷ Ibrahim Alfian, *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Hasil-hasil Penelitian dengan Metode Ground Research), (Jakarta: L P3ES, 1997), hlm. 177.

³⁸ T.I. El Hakimi, *“Beberapa Segi Hukum Adat Tentang Tanah Pedesaan”*, (Penelitian Rral Developmeny Center, Syiah Kuala, Banda Aceh, 1981), hlm. 19.

³⁹ M. Gade Ismail, *“Seneubok Lada”*, (Disertai Belum Diterbitkan Leiden, 1991), hlm. 52.

- c. Wazir seri maharaja mangkubumi adalah pejabat yang menangani masalah hasil hutan, sekitar menteri kehutanan
- d. Teuku keurukon katibul muluk, adalah seorang penguasa yang membidangi bagian sekretariat negara termasuk penulis resmi surat raja, yang bergelar lengkap wazir rama setia kerukoen katibul muluk sekitar sekretaris negara.⁴⁰

Pada masa Kerajaan Aceh berdiri beberapa kerajaan seperti Pereulak, Pase, Trunom, Daya. Selain kerajaan ini, wilayah bebas lainnya dikuasai oleh raja-raja yang lebih rendah sedangkan Sultan Iskandar Muda terintegrasi ke semua wilayah. *Nanggroe* atau tiga wilayah utama kesultanan yang dikenal dengan Aceh Besar, masing-masing diperintah oleh *Uleebalang*. Pada masa Sultanah Zakiatuddin Inayah Syah bersama Kadil Malikul Adil (Mufti Agung) Tgk Syaikh Abdurrauf As Singkil melakukan reformasi sektor daerah.

Dengan izin dari tiga panglima *Sagoe* dan Teuku Kadi Malikul Adil, sultan/sultan akan diangkat atau diturunkan (Mufti Agung Kerajaan). Sultan membayar *Jinamee* Aceh (Mahar Aceh) yang baru-baru ini dinyatakan sah, yaitu 32 kati emas murni, uang tunai seribu enam ratus ringgit, beberapa puluh ekor kerbau, dan beberapa beras gunca, di kawasan yang langsung berada di bawah kekuasaan Sultan (wilayah Bibeueh) sejak Sultanah Zakiatuddin Inayah Syah berada di wilayah Darud Dunia, Masjid Agung, Meuraxa.

⁴⁰K.F.H. Van Lange, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, (Alih Bahasa: Aboe Bakar, Dalam Bijdragen Tot De Taal, Land-Envolkenkunde Van Nederland Indie 5, Jilid III, 1888), hlm. 45.

Secara teoritis *Uleebalang* berfungsi sebagai perpanjangan atau pejabat Kerajaan Aceh ditugaskan, tetapi tidak dibuat oleh *Syakbandar*. Menurut adat “Meukuta Alam” dalam pengangkatan seorang *Uleebalang* tidak perlu menerima surat dari raja tetapi ia mewarisi kedudukan leluhurnya.⁴¹ Meskipun demikian, mereka mengakui posisi dan menerima surat pengangkatan sebagai “Raja” dari Sultan. Selain disahkan dengan *Cap Sikureung*, *Uleebalang* juga di ikatkan dengan sumpah.



Gambar 2.2. Stempel Cap Sikureung Kerajaan Aceh

Dalam sarakata bahwa *Uleebalang* terikat dalam sumpah yang isinya sebagai berikut:

“Demi Allah, kami sekalian hulubalang khadam negeri aceh, dan sekalian kami ada jabatan masing masing kadar martabat, besar kecil, timur barat, tunong baroh, sekalian kami ini semuanya, kami that setia kepada Allah dan Rasulnya, dan kami semua ini that setia kepada agama Islam, mengikuti syariat Nabi Muhammad saw, dan kami semuanya cinta pada Negeri Aceh, mepertahankan dari pada serangan musuh, kecuali ada masyakkah, dan kami semua ini cinta kasih pada sekalian rakyat dengan memegang amanah harta orang yang telah dipercayakan oleh empunya milik. Maka jika semua kami yang telah bersumpah ini berkhianat dengan mengubah janji seperti yang telah kami ikral dalam sumpah kami semua ini, demi Allah kami semua dapat kutuk Allah dan rasul, mulai dari kami semua sampai pada anak cucu kami dan cicit kami turun-temurun, dapat cerai bera

⁴¹ K.F.H. Van Langen, “Atjehsch Staatsheestuur”..., hlm. 437.

bekelahi, bantah dakwa-dakwa dan dicari oleh senjata mana-mana berupa apa-apa sekalipun. Wassalam”.⁴²

M.Nur El Ibrahimy mengatakan bahwa “*Uleebalang*” dalam kamus Bahasa Indonesia. Ia mengutip W.J.S. Poerwadarminta yang menyebutkan Hulubalang yang yaitu kepala lascar atau pemimpin pasukan. Didalam hikayat raja-raja Nusantara kata hulubalang yaitu pangkat didalam jabatan ketentaraan.

Sultan Ali mughayat memegang kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam selama 10 tahun. Dasar-dasar politik luar negeri juga diletakkan di negeri kesulthanan, antaranya :

- a. Menyediakan kebutuhan mereka sendiri sehingga mereka tidak bergantung pada orang lain.
- b. Memperkuat ikatan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara.
- c. Waspada terhadap kolonialisme barat
- d. Mencari bantuan ahli dari pihak luar
- e. Menyelenggarakan dakwah Islam di seluruh nusantara.

Setiap desa memiliki *Meunasah*, dan organisasi mukim desa memiliki masjid tempat shalat Jumat dilakukan menurut mazhab Syafi'i. Kecuali tiga daerah *sagoe*, semua daerah memiliki tingkat otonomi yang tinggi. Secara teori, pejabat sultan diberikan sarakata pengangkatan dengan *Cap Sikureung*, tetapi *Uleebalang* memiliki wewenang untuk memerintah provinsi *otonom non-lhee sagoe*. Sultan tidak mampu mengelola semua *Uleebalang* yang naik ke posisi kekuasaan. Maka lambat laun mereka tidak lagi mau menuruti dan mendengar kekuasaan Sultan.

⁴²Tita putu, Sejarah Kerajaan Islam Kesultanan Aceh Darussalam,
https://www.academia.edu/34068722/Sejarah_Kerajaan_Islam_Kesultanan_Aceh_Darussalam

C. Penguatan Sosial Ekonomi

Aceh mengalami perkembangan pesat dalam bidang perdagang dengan pedagang luar negeri pada abad-19. Pelabuhan-pelabuhan Aceh dipadati kapal-kapal asing. Aceh dikenal sebagai pengekspor lada penting di Nusantara, begitu juga dengan komunitas pinang dan kopra. Serta produk Aceh diekspor ke Penang, kemudian dikirim ke tiongkok, Myanmar, Malabar dan coromandel. Hubungan perdagangan langsung dikembangkan antara banyak pelabuhan Aceh dan Bengal, Madras, Mumbai, Malaka, dan Singapura antara tahun 1820 dan 1840.⁴³

Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam pelayaran dan perdagangan. Pada puncaknya, perekonomian tumbuh pesat. Penguasaan Aceh terhadap pantai barat dan pantai timur Sumatra menghasilkan banyak lada dan timah. Sumber daya alam menjadi bahan ekspor penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh berkembang pesat.

Keberadaan wilayah Aceh yang strategis memungkinkan perdagangannya berkembang pesat. Oleh karena itu, budaya masyarakat juga semakin bertambah maju karena sering berinteraksi dengan bangsa lain. Contohnya adalah penyusunan hukum adat berdasarkan ajaran islam yang dikenal dengan Hukum Adat Meukuta Alam. Pengangkatan seorang raja harus sesuai dengan hukum. Ketika seorang sultan dilantik, dia berdiri di atas tabal, imam memegang Alquran di sebelah kanan, perdana menteri memegang pedang di sebelah kanan, dan perdana menteri memegang pedang di sebelah kiri.

⁴³ John Anderson, *Acheen and The Port On The Nort And Coast Of Sumatra*, hlm 163.

Hukum Adat Meukuta Alam menguraikan kekuasaan Sultan Aceh, sebagai berikut:

1. Pengangkatan panglima-panglima sagi dan *Uleebalang* pada acara pengangkatan membunyikan 21 kali dentuman Meriam sebagai tanda penghormatan.
2. Keputusan tentang isu-isu terkait pemerintah.
3. Menerima kunjungan kehormatan dari pedagang luar negeri.
4. Menunjuk penasihat hukum (ulama).
5. Mengangkat orang yang cerdas dan cerdas untuk menjaga kerajaan.
6. Melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang pejabat kerajaan.

Pidie dan Aceh Selatan, serta Aceh Timur dan Pasai Aceh Utara, merupakan lokasi penghasil lada pada abad ke-17. Selain pinang dan kopra, lahan tersebut dialihfungsikan menjadi areal persawahan.⁴⁴ Minyak tanah dari deli, belerang dari Pulau Weh dan Gunung Seulawah, kapur dari Singkil, kapur barus dan kemenyan dari Barus, emas di pantai barat, dan sutra dari Bandar Aceh semuanya merupakan komoditas yang dipasarkan di Aceh. Selain itu, ada banyak tukang emas, tukang tembaga, dan orang-orang yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi di ibu kota. Sedangkan Pidie berfungsi sebagai lumbung beras Kesultanan. Namun diantara semuanya yang menjadi komoditas unggulan untuk diekspor adalah Lada.

Produksi dimulai pada tahun 1820. Nilai ekspor Aceh diperkirakan 1,9 juta dolar Spanyol, menurut perkiraan Penang. Sebanyak \$400.000 dikirim ke Penang,

⁴⁴ Hasbullah, *Uleebalang: dari Kesultanan Hingga Revolusi Sosial (1514-1946)*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2015), hlm. 7.

dengan \$1 juta diangkut oleh pedagang Amerika dari wilayah lada Pantai Barat. Kargo yang tersisa diangkut oleh kapal dagang India, Prancis, dan Arab. Sentra lada berada di Rigas, Teunom, dan Meulaboh terletak di sebelah barat. Kemegahan kejayaan yang telah dicapai tentu saja didukung oleh perkembangan ekonomi (perdagangan), sehingga penerimaan dari sektor pajak (dalam Bahasa Aceh pajak disebut dengan *wase*, *hase* dan *adat*).⁴⁵

Pemungutan dan distribusi pajak masa Kerajaan Aceh Darussalam ialah bertugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan pajak atau cukai dipelabuhan-pelabuhan dan pusat-pusat atau perdagangan hasil bumi lainnya diserahkan kepada sebuah pusat lembaga yang dinamai *Balai Furdhah*.⁴⁶ Pemungutan pajak di daerah-daerah taklukan menjadi tugas *Uleebalang*. Dalam pasal *Qanun Meukuta Alam*, tercantum tugas-tugas *Uleebalang* yang telah diangkat. *Uleebalang* wajib memungut hasil bumi, laut dan darat untuk diantar ke pusat kerajaan dan juga membangun negara, seperti membangun jalan, membangun masjid di daerah yang belum ada masjid, dan

⁴⁵ Pajak disebut *Wase, Uso; Ucho; Usur; Kerajat Khuerajat, Siwa, Ha'pa'*. Padana kata untuk cukai adalah *cuke, adat.Pa'; keurajat*, Lihat M. Hasan Basry, *Kamus umum Indonesia-Aceh*, (Jakarta: Yayasan Cakra Daru, 1994), hlm.173 dan 652.

⁴⁶ Ali hasjmy merincikan tugas dan wewenang *Balai Furdah* secara lebih detail. *Balai furdah* (kementrian perdagangan) dipimpin oleh pejabat kerajaan yang bergelar *Menteri Seri paduka Wasir Perniagaan*. Balai ini memiliki tugas bukan hanya mengurus perdagangan dalam dan luar negeri, tetapi mencakup mengurus dan mengawasi bidang-bidang usaha yang menghasilkan bahan-bahan perdagangan, seperti pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, perkapalan/pelayaran. Oleh karena bidang tugas yang di emban oleh lembaga ini begitu luas, maka pejabat-pejabat penting yang ditugaskan dalam *Balai Furdah* ini cukup banyak, mencapai 33 orang dengan bidang tugasnya masing-masing; Alihasjmy, *Op.cit.*, hlm. 84.

memperbaiki/merehap mesjid-mesjid yang rusak, membangun madrastsah dan dayah tempat pengajian dan tempat beribadah⁴⁷.

Pembayaran atau iuran tersebut diperuntukkan kepada kepentingan negara diserahkan oleh kolektor kepada *Uleebalang* (kepala adat) dari berbagai daerah yang bersangkutan di pemerintah kesultanan. Selanjutnya tugas *Uleebalang* yang membagi-bagi kepada petugas-petugas yang telah ditentukan dalam wilayahnya masing-masing. Dan juga sebagian dari hasil tersebut dipersembahkan kepada sultan Aceh di Banda Aceh pada tiap-tiap tahunnya oleh *Uleebalang*. Kemudian semua harta kerajaan disimpan di *Daruddunia* dan dipergunakan untuk kepentingan negara.⁴⁸

Haria bertugas untuk mengutip pajak di pasar pada hari peukan (tempat berjual beli hasil negeri atau tempat memasukkan barang-barang dari luar negeri). *Haria* menerima segala perintah tersebut dari syahbandar kedua pegawai tersebut berada dibawah *Uleebalang*. Tugas *haria* lainnya menimbang segala barang keluar yang kemudian beratnya dimasukkan dalam register oleh syahbandar. Segala *wase (bea)* keluar masuk diserahkan oleh syahbandar kepada *Uleebalang*, kemudian *Uleebalanglah* yang menyerahkan *wase* tersebut kepada sultan atau kepada wakil sultan yang telah ditetapkan.

Pendapatan untuk syahbandar 5 *peng* untuk tiap-tiap satu karung barang yang telah keluar dan untuk *haria* mendapat 2 *peng*, uang tersebut dibayar oleh

⁴⁷ M. Zainuddin, *Singa Atjeh*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1957). hlm, 91.

⁴⁸ Moehammad Hoesein, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm. 117.

saudagar yang membawa barang-barang itu keluar.⁴⁹ Adapun *keujruen* bertugas untuk pemungutan pajak hasil hutan atau *Wase gle* terhadap kebun-kebun lada yang diusahakan oleh kerajaan tetapi tidak diserahkan kepada *Uleebalang* melainkan pelaksanaannya diserahkan kepada wakil sultan.⁵⁰



⁴⁹ M. Zainuddin, *Singa Atjeh*, hlm, 84.

⁵⁰ Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675*, (Medan: Penerbit Monara, 1972), hlm. 93.

BAB III

ULEEBALANG PADA MASA KERAJAAN ACEH DARUSSALAM

A. Sistem Pemerintahan *Uleebalang* Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam

Uleebalang terdapat dalam bahasa Aceh persamaan dengan hulubalang dalam Bahasa Indonesia, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hulubalang berarti panglima tentara, pemimpin pasukan, kepala negara, penjaga dan polisi desa (*dubalang*), dalam kisah raja-raja Melayu hulubalang merupakan nama jabatan ketentaraan atau militer di wilayah Aceh.⁵¹



Gambar 3.1. *Uleebalang* penguasa kecil Aceh dari masa Kesultanan sampai Revolusi Sosial (1512-1946). (Sumber TengkuPuteh.com).

Gambar di atas menggambarkan *Uleebalang* penguasa kecil Aceh dari masa Kesultanan sampai Revolusi Sosial (1512-1946). Teukoe Nja Hamsa (paling kiri), Teukoe Lampasei (kiri di sofa), Teukoe Nek Radja Meuraksa (kanan di sofa), dan Teukoe Nja Mohammad (kedua dari kanan) bersama pengikut.

⁵¹Antom M. Moeliona dan Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 361.

Mereka adalah *Uleebalang* pertama yang bekerja dengan Belanda (selama perang Aceh).foto diambil di wilayah Meuraksa pada tahun 1874 (bagian dari Banda Aceh sekarang). Sumber dari KITLV.

Aceh memiliki pemekaran feodal berdasarkan mukim yang masing-masing terdiri dari desa-desa muslim dan diberi nama berdasarkan jumlah mukim yang sebelumnya disebut mukim IX, mukim VI, dan seterusnya. Para mukim direorganisasi menjadi tiga federasi besar, yang dikenal sebagai *sagi* di Aceh, dan diberi nama sesuai dengan jumlah mukim yang mereka miliki. *Sagi mukim XXV* menutupi sisi hilir sungai Aceh, *sagi mukim XXVI* membentuk lembah besar di tepi kanan, dan *sagi mukim XXII* menghasilkan delta titik segitiga di kedua tepi sungai, membentuk tiga *sagi* (keadaan ini masih berlaku , tetapi hanya sedikit artinya bagi pemerintah).⁵²

Potensi *Uleebalang* sangat luas.Banyak kekuasaan pemerintah di bidang tertentu diserahkan sepenuhnya kepada *Uleebalang*. Sehingga *nanggroe* dengan pimpinan *Uleebalang* sudah menjadi daerah otonom yang luas, mengubah kota ini menjadi tujuan kelas dunia. *Uleebalang* bertindak sebagai penguasa daerah yang merdeka sehingga kekuasaan sultan hanya bersifat formalitas.sehingga kekuasaan Sultan hanya bersifat seremonial. Peristiwa ini terjadi sekitar tanggal 17 Agustus, ketika pemerintah Aceh sedang menghadapi situasi yang sangat sulit.⁵³

⁵² Paul Van 'T Veer, *Perang Aceh Kegagalan Snouck Hurgronje*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985), hlm, 72.

⁵³ Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh...*, hlm. 89-90.

Orang Aceh menyebut *Nanggroe* (negeri) *Uleebalang* atau banyak *Mukim*, dan untuk lebih spesifiknya mereka menggabungkan kedua nama tersebut, misalnya menjadi tujuh bukit baet, yaitu ke*Uleebalang*, yang terdiri dari VII mukim oleh seorang *Uleebalang* bergelar "Teuku Muda Baet".

Uleebalang Poteu adalah seorang raja (Sultan) yang menduduki jabatan kepercayaan di wilayah kesultanan atau yang menduduki jabatan penting di lingkungan keraton, atau yang mendapat pangkat semata-mata pemberian raja, pangkat tersebut bersifat turun temurun. Bentuk lain ditemukan di antara para kepala negeri taklukan yang jauh, yang bangga dengan posisi *Uleebalang* mereka sebagai simbol pangkat tinggi mereka. Pemerintah Aceh seolah memandang rendah orang yang haus pangkat, menganggap mereka hanya "*Kudjrue*n" (ajudan jenderal) atau hanya "*Meuntroe*" (menteri).⁵⁴

Gelar-gelar panggilan mengenal garis keturunan dari para *Uleebalang*, maka dari itu pdatang dari luar Aceh akan mudah mengenalnya dari garis keturunan dari *Uleebalang*. Yaitu:

1. Teuku adalah sebutan bagi keluarga *Uleebalang* (laki-laki)
2. Tengku adalah sebutan bagi *Uleebalang* di Aceh Timur dan bangsawan Melayu).
3. Cut, umumnya adalah sebutan bagi anggota perempuan keluarga *Uleebalang* di Aceh.
4. Tuanku adalah sebutan bagi anggota keluarga *Uleebalang* dan sebutan untuk keturunan dekat Sultan Aceh, serta gelar bangsawan Melayu),

⁵⁴ Snouck Hurgronje, *Aceh Dimata Kolonialis*, Terj. Ng. Singarimbun, dkk, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 104.

5. Ampon (gelar *Uleebalang* selain teuku untuk laki-laki).⁵⁵

Antara tahun 1874 dan 1942, ada lebih dari seratus *Nanggroe* atau *landschappen* yang dipimpin oleh *Uleebalang*, yang oleh Belanda disebut sebagai *Zelfbestuurder* (pemerintahan sendiri) di Aceh. Wilayah Aceh besar disebut *Sagoe*, dan penguasanya *Uleebalang*, disebut *Sagihooft*.



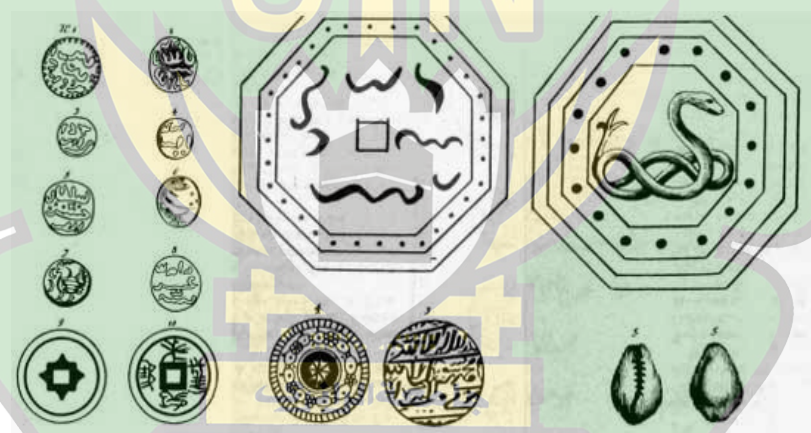
Gambar. 3.2
Sumber KITLV

Gambar di atas menggambarkan seorang *Uleebalang* (*teuku*) Nja Gadang dan istrinya (*Cut*) yang ditangkap di Aceh dalam keadaan dirantai karena menentang pemerintahan kolonial Belanda dan diturunkan dari kapal di Kutaradja (sekarang Banda Aceh) sebelum diangkut ke pengasingan. Adapun foto ini di ambil pada tahun 1897.

⁵⁵ Antony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, Penterj. Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 313.

B. Kondisi Ekonomi Sosial Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam

Ekonomi merupakan hal yang paling penting dalam sistem kehidupan kerajaan, yang dilakukan oleh para sultan dalam upaya membangun sektor perdagangan bahari, suatu kerajaan yang mencapai masa kejayaan pasti juga mengalami masa kejayaan dalam bidang ekonomi seperti kesultanan Aceh yang mengalami masa puncak pada Masa Sultan Iskandar Muda diukur dengan kemakmuran dan kemajuan kerajaan tidak terlepas dari sumber keuangan yang melimpah dan salah satunya adalah pajak. Pajak dipungut di kerajaan meliputi hasil pertanian, peternakan, hasil hutan dan bentuk-bentuk lain menurut pekerjaan rakyat.⁵⁶



Gambar.3.3
Mata Uang Kesultanan Aceh Darussalam

Salah satu sektor ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam yaitu sektor penghasil pajak andalan:

⁵⁶ Tengku Puteh, *Sistem Perpajakan dan Keuangan Kerajaan Aceh Darussalam*, (Posted On 14 Agustus 2020).

1. Pajak Bea masuk dan keluar Barang Dagangan

Sultan kerajaan memerintahkan Kerajaan Aceh Darussalam berupaya keras menjadikan pelabuhan bandar Aceh Darussalam sebagai pusat perdagangan internasional yang didatangi oleh pedagang asing dari berbagai negara untuk berniaga. Menyadari pentingnya sektor ini sebagai sumber penghasilan negara yang besar. Kemudian Ali Mughayat Syah mulai merintis usaha tersebut dengan menyatukan pusat perdagangan di Bandar Aceh Darussalam yang sebelumnya tersebar di daerah-daerah seperti Kerajaan Daya, Pidie dan Samudra Pasai yang diantara kerajaan tersebut sebagai penghasil lada yang pada saat itu sangat diminati oleh pedagang asing, seperti pasai.⁵⁷

Pedagang keliling dan pedagang lokal terlibat dalam perdagangan internasional. Pedagang keliling datang dari pendatang luar negeri yang singgah di pelabuhan Aceh untuk menurunkan barangnya. Negara-negara Eropa (Portugis, Inggris, Perancis, dan Belanda), Amerika Serikat, bangsa India (Keling, Malabar, dan Gujarat), Turki, Arab, Persia, Burma (pegu), Cina, dan pedagang Melayu termasuk di antaranya.⁵⁸

Uleebalang kaum bangsawan atau orang kaya setempat termasuk sebagai pedagang lokal, ibu kota kerajaan menjadi ramai dikarenakan para pedagang-pedagang berpergian yang tinggal dan mendirikan perkampungan di wilayah kota seperti kampung Keudah, Kampong Jawa, Kampong Peulanggahan atau Kampong Pande, yang berada di Banda Aceh.

⁵⁷ R. Mohammad Ali, *Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara*, (Jakarta: Bhratara, 1963), hlm. 118.

⁵⁸ Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda. Terjemahan Arifin Winarsih*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 150-165.

Politik ekspansi dan monopoli perdagangan yang dijalankan oleh raja pertama kesultanan Aceh, Sultan Ali Mughayat Syah dilanjutkan oleh penerusnya dan masa keemasan pada Masa Sultan Iskandar Muda, masa tersebut lada menjadi yang sangat diminati oleh pedagang asing, sultan melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang lebih luas dan memusatkan mata dagangan lada, sebagai komoditi ekspor yang sangat diminati oleh pasar internasional.

Lada menjadi lambang perdagangan di Kerajaan Aceh Darussalam, setiap pelabuhan terkenal dengan hasil buminya seperti hasil hutan dan tambang, Pedir terkenal dengan kesuburan tanahnya dan menjadi lumbung padi/beras bagi kerajaan dari Pasai hingga ke Deli merupakan daerah yang subur dan cocok sebagai lahan perkebunan, Deli penghasil minyak bumi, Daya terkenal dengan kesuburan tanahnya menghasilkan banyak beras serta kaya dengan binatang ternak. Kota Singkil banyak menghasilkan kapur barus dan kemenyan. Pesamaan tersebut, sekarang termasuk kedalam wilayah Sumatera Barat menghasilkan lada.

Hasil bumi yang berlimpah seperti cengkeh, lada, dan pinang membuat Bangsa Eropa tertarik terhadap Aceh tidak hanya disebabkan tempatnya yang strategis, namun disebabkan pula oleh hasil bumi yang berlimpah.⁵⁹ Rakyat Aceh terkenal dengan keramahan terhadap warga asing yang datang ke Aceh, seperti rakyat Aceh dengan terbuka menerima kedatangan bangsa asing apabila tujuannya baik untuk kepentingan perdagangan, namun saat tujuan mereka berubah ingin menguasai wilayah Nusantara maka rakyat Aceh menentang dengan sangat keras.

⁵⁹A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 22-27

Bangsa eropa dengan liciknya melakukan pendekatan untuk mengambil Alih daerah-daerah bahkan tanpa segan mengelabui rakyat pribumi.⁶⁰

Perdagang yang berasal dari luar negeri yang ingin berdagang ke daerah Bandar Aceh darussalam memiliki prinsip-prinsip dalam perniagaan seperti bahan-bahan diperbolehkan untuk mengekspor dan mengimpor, besarnya pajak, berlaku bagi kapal yang berlabuh dan lainnya. Undang-undang perdagangan luar negeri Aceh dicantumkan berupa 73 jenis barang dagangan yang di ekspor-impor serta ditetapkan jumlah pajaknya.⁶¹ Diantara barang yang utama adalah lada, pinang, padi,emas, kayu, kapur barus, gading gajah, dll.

2. Kehidupan sosial budaya *Uleebalang*

Uleebalang juga seperti anggota masyarakat pada umumnya, yang senantiasa membutuhkan makan, minum, kendaraan, lahan pertanian serta tempat berteduh dan lainnya. Tidak bisa dinafikkan bahwa *Uleebalang* sebagai elit sosial dalam masyarakat, maka dari itu rakyat selalu menanti kedatangan dan membutuhkan kebijakan dalam segala hal.

Hubungan *Uleebalang* dengan masyarakat kendati semakin rapuh dikarenakan para *Uleebalang* tidak sering lagi memimpin dan tidak memperdulikan kepentingan rakyat. Mereka terlalu fokus dengan kegiatan

⁶⁰Sudirman, *Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional 1500-1873*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2019), hlm.72.

⁶¹Di Meulek, *Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda*, (Naskah Disimpan di Museum Ali Hasjmy Banda Aceh), hlm.127-130.

berdagang untuk kepentingan pribadi dan sibuk mengurus persawahan di pidie serta ladang lada di Aceh Timur.⁶²

Penyedia modal dan rakyat sebagai peminjam, begitulah pandangan masyarakat terhadap *Uleebalang* hubungan pemerintahan mereka ada yang tidak tepat kepada peraturan sultan, diantaranya banyak yang semen-mena mengatur negeri. Antara tuan tanah (*Land lords*) dan persewaan atau petani yang penggarap, antara pembeli dan penjual. Rakyat melihat mereka sebagai makhluk yang teropsesi dengan ekonomi semata.

Uleebalang beberapa diantaranya ada yang semen-mena memperlakukan rakyat seperti memeras dalam segala hal seperti pemberi modal, atau mereka sebagai penguasa yang berhak menarik pajak dengan rakyat, mereka juga memaksa rakyat untuk bekerja tanpa upah sebagai keperluan pribadi seperti pembuatan pagar rumah mereka mengerjakan sawah dan sebagainya.⁶³ Masyarakat melihat *Uleebalang* sebagai karakter yang menakutkan, berbeda dengan tokoh masyarakat lainnya seperti ulama.

Snouck dalam karya monumentalnya *the Achehnese* mengatakan *Uleebalang* sebagai penguasa menerima bermacam-macam kecurigaan dibandingkan tumpuan.⁶⁴ Jika rakyat menerima mereka maka dalam keadaan terpaksa dikarenakan mereka merupakan kepala-kepala adat (*adat rulers*), Pelaksanaan tugas *Uleebalang* banyak dibantu oleh bawahannya seperti “Banta”

⁶² Jame T. Siegel, *The Rope Of God*, (Berkeley Add Angeles: University Of California Press, 1996), hlm..32.

⁶³ Jame T. siegel, *The rope of god*....., hlm. 33.

⁶⁴ Snouck, *The Achehnese*....., hlm. 290.

masyarakat banyak yang bergantung pada kelompok yang disebut banta ini dalam beberapa daerah di *nanggroe*.⁶⁵

Kemudian “Rakan” merupakan mereka yang melaksanakan semua suruhan dari *Uleebalang* dengan sangat kejam. Kebutuhan rakan sepenuhnya ditanggung oleh *Uleebalang*, juga ada rakan-rakan yang menetap di kediaman *uleebalang* dan juga ada yang tinggal dirumah sendiri dan jaraknya tidak jauh dengan rumah *Uleebalang*.⁶⁶ *Uleebalang* juga dibantu oleh “panglima prang”.⁶⁷

C. Peran *Uleebalang* Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam

Uleebalang adalah bawahan sultan Aceh, diangkat untuk membantu tugas kesultanan. *Uleebalang* memiliki wilayah yang dikelola sendiri sehingga menjelma menjadi raja-raja kecil. Pada paruh terakhir abad ke 19, struktur masyarakat Aceh masih dalam polarisasi adanya kepemimpinan adat dan agama. Nilai adat menjadi urusan sultan dan *Uleebalang*, maka agama merupakan wilayah dari ulama. Kekuasaan *Uleebalang* yang diperoleh secara turun temurun itu disebut *nanggroe* (negeri) dengan wilayah dan penduduk yang berbeda beda. *Uleebalang* memiliki wewenang untuk menjaga agama Islam dan menciptakan suasana kondusif.⁶⁸

⁶⁵Banta adalah adik kandung sendiri ataupun kerabat dekat lainnya, dan sebagian mereka ada yang bertindak sebagai kaki tangan *Uleebalang*. Snouck, *Aceh*....., hlm. 105.

⁶⁶Jame T. siegel, *The rope of god*....., hlm. 50

⁶⁷Perdagangan internasional terjadi antara pedagang keliling dan pedagang lokal. Pedagang keliling adalah pendatang asing yang singgah di Aceh untuk menurunkan barang dagangannya. Mereka termasuk negara-negara Eropa (Portugis, Inggris, Prancis, dan Belanda), Amerika Serikat, negara-negara India (Keling, Malabar, dan Gujarat), pedagang Turki, Arab, Persia, Burma (pegu), Cina, dan Melayu. Lihat Snouck, *Aceh*....., hlm. 106-123.

⁶⁸Eka Sri Mulyani, dkk, *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2018), hlm. 154.

Kedatangan Belanda ke Aceh mengubah suasana kehidupan sosial rakyat Aceh, yang dulunya kekuasaan *Uleebalang* dengan kelompok elit berjalan harmonis. Di dalam adat Meukuta Alam bahwasannya kekuasaan *Uleebalang* merupakan karunia Allah dan dituntut loyaritas kepada kerajaan Aceh.⁶⁹

Wilayah Aceh, raja dibagi menjadi tiga *sagoe* (kecamatan), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan seorang panglima *sagoe*, yaitu *sagoe* XXII mukim, *Sagoe* XXV, dan *Sagoe* XXVI mukim. Ada beberapa *Uleebalang* di bawah setiap panglima *sagoe*, masing-masing dengan wilayah mukimnya sendiri. Di bawah *Uleebalang* dipimpin oleh seorang kepala suku yang bergelar *imeum*. Mukim terdiri dari beberapa desa yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar *keutjhi*.

Panglima Polem adalah salah satu dari berbagai gelar kehormatan yang dianugerahkan kepada seorang keturunan bangsawan Aceh. Dalam pemerintahan Kerajaan Aceh, Panglima Polem adalah Pj Panglima *Sagoe* XXII Mukim (pedalaman Aceh Besar), dengan bergelar Sri Muda Seutia Peurkasa. Panglima *Sagoe* XXVI bergelar Sri Imam Muda di sebelah kanan Aceh Besar, sedangkan Mukim XXV bergelar Setia Ulama di sebelah kiri. Meskipun setiap panglima *sagoe* membawahi *Uleebalang*, *imeum* Mukim, dan *Keucik*, tetapi khusus daerah *sagoe* pedalaman yang boleh memiliki gelar Panglima Polem.⁷⁰

⁶⁹Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1991), hlm. 9.

⁷⁰ Pemerintahan Aceh, *Tengku Panglima Polem*, (Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh, 2022) <http://mirror.acehprov.go.id/jelajah/read/2013/10/02/19/teuku-panglima-polem.html>

D. Pengaruh Uleebalang pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam

1. Hubungan *Uleebalang* Dengan Belanda

Kedatangan Belanda ke Aceh banyak mengalami perubahan dalam keadaan masyarakat mulai dari segi kehidupan, ekonomi, serta kebudayaan yang berganti-ganti, seperti hal nya sebelum kedatangan Belanda ke Aceh para *Uleebalang* yang penurut akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala *nanggroe*, setelah kedatangan Belanda keadaan mulai berubah banyak *Uleebalang* yang bembangkang dengan pemerintahannya dan ada juga yang bekerja sama dengan para tentara Belanda serta ada yang mendapat upah serta tugas dari para penjajahan Belanda.

Setelah menandatangani kesepakatan singkat dan wajib mengakui kedaulatan Belanda, walaupun *Uleebalang* diangkat berdasarkan surat keputusan sultan Aceh.⁷¹ Apa dipikirkan *Uleebalang* saat itu hanyalah uang dan kekuasaan. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kesenangan, akal mereka juga seperti Belanda yang hanya memikirkan kesenangan pribadi tanpa memikirkan rakyat mereka yang tetap mengalami kesulitan dan kepedihan karena peperangan yang berkepanjangan.

Selain *Uleebalang* yang kurang setia terhadap kesultanan, sebaliknya *Uleebalang* yang tidak setia dengan para Belanda dan membuat Belanda susah dalam menangani mereka. Pada tahun 1931 seorang pejabat tinggi Belanda memimpin sidang *Musapat* di Sigli yang dihadiri oleh sejumlah *Uleebalang*. Belanda tidak mau menerima permintaan *Uleebalang* dari Titeu Keumala untuk

⁷¹Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam*....., hlm. 9.

memberikan hukuman berat kepada rakyat jelata yang telah memukul anaknya. *Uleebalang* sangat kesal terhadap Belanda sehingga menikamnya dengan rencong hingga mati.⁷²

Pada tahun 1930-an para *Uleebalang* yang serakah menjadi ketergantungan pada Belanda untuk memenuhi keinginan mereka. Lebih kejam lagi *Uleebalang* di Pidie menuntut agar Belanda menyediakan pasukan perang militer untuk membuat orang Aceh bekerja lebih keras di persawahan.⁷³ Tetapi tidak semua *Uleebalang* seberuntung itu, terutama kebanyakan *Uleebalang* di Aceh timur yang menerima bayaran dari perusahaan pertambangan dan perkebunan Eropa dan pidie yang memiliki sawah luas.

Uleebalang yang berada di daerah pesisir relatif miskin, mereka harus menebus tanah mereka jika ada yang kalah di pengadilan, harus terpaksa kerja rodi untuk meningkatkan pendapatan mereka, mereka juga harus menciptakan cara-cara baru seperti mengarahkan zakat, sebelumnya di bawah pengawasan ulama.⁷⁴

2. *Uleebalang* Dalam Perdagangan

Karena pelabuhan-pelabuhan Aceh tersumbat oleh kapal-kapal asing pada abad kesembilan belas, perdagangan dengan luar negeri terus meningkat pesat. Aceh terkenal dengan negeri pengeksport lada utama di kepulauan Nusantara. Sekitar tahun 1820-1840 hubungan perdagangan langsung terjalin

⁷² H. C. Zentgraaf, *Atjeh*, (Batavia: De Unie, 1938), hlm. 50.

⁷³ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi Dan Hancurnya Kerajaan Di Sumatra*, Penerj. Anonymous, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 43.

⁷⁴ Snouck, *Aceh*....., hlm. 134-135

diantara beberapa pelabuhan yaitu Aceh dan Benggal, Madras, Mumbay serta Malaka dan Singapura.⁷⁵

Banyak *Uleebalang* berdagang dengan pedagang luar negeri melalui pelabuhan di wilayahnya. Mereka bertanggung jawab untuk mengutip *wasee* barang yang keluar dari wilayah guna kepentingan pribadi. Negatifnya kelakuan *Uleebalang* pada masa itu dan tidak mengindahkan ketentuan kesepakatan tujuan mereka hanya untuk berdagang, mendapatkan keuntungan besar dan sibuk di pelabuhan.⁷⁶

E. Sistem Pemerintahan *Uleebalang* Terhadap Kerajaan

Uleebalang merupakan yang disegankan dinegeri masing-masing yang berartiseorang kepala wilayah yaitu disebut *par excellence*. Oleh karena, mereka disebut sebagai raja (atau dalam bahasa Aceh disebut kepala daerah), baik secara harfiah maupun simbolis, karena istilah *Uleebalang* (hulubalang) berarti panglima tentara. Ketentuan di dalam Adat Meukuta Alam, dikatakan bahwa *Uleebalang* tidak dalam pengangkatannya tidak menggunakan surat dari tangan sultan, hal ini dikarenakan bahwa *Uleebalang* mewarisi jabatannya dari nenek moyangnya. *Uleebalang* dan pemimpin daerah percaya bahwa posisi mereka tidak bergantung pada surat pengangkatan dari raja, tetapi kedua posisi melihat surat penunjukan dari raja sebagai suap untuk posisi mereka.⁷⁷

⁷⁵ Andeson, John, *Acheen And The Port On The Nort And East Coast Of Sumatra*, hlm 163.

⁷⁶ Andeson, John, *Acheen And The Port.....*, hlm. 7-8

Aliansi sagi timbul karena tekanan keadaan tertentu dari zaman dahulu kala, pengengketaan intern dan segala macam peperangan lazim terjadi di Aceh. Dan setiap gampong sendirian, dapat dengan mudah menjadi mangsa parapertualang, kemudian mereka mencari perlindungan dibawah naungan *Uleebalang*, begitu juga *Uleebalang* dalam suasana kerusuhan umumnya menyadari keuntungandari persekutuan defensive atau ofensif dengan negara tetangga.

Mempertimbangkan kebutuhan akan seorang pemimpin, yang paling kuat dan berpengaruh dipilih di antara mereka. Namun, kekuasaan komandan sagi terbatas pada hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, dengan masing-masing *Uleebalang* menguasai wilayahnya masing-masing, karena tidak ada sagi.⁷⁷ *Uleebalang* yang memegang kekuasaan didalam tiga sagi ada dua jenis. Yaitu *Uleebalang Poteu* atau disebut hulubalang raja, ia memegang pimpinan di wilayah raja atau memiliki jabatan tinggi dalam di kerajaan.

Berbagai macam kepala daerah ditaklukan wilayah terpencil yang ditaklukkan di ketinggian. Para penguasa Aceh naif memandang kaum yang haus jabatan tersebut. Dan beranggapan bahwa pemimpin daerah ditaklukkan hanya sekedar *Kenjruen* (kejuruan) belaka atau hanya seorang *Meutroe* (mantri) berapapun hebat pangkat diperoleh karena keberuntungan, karena bantuan raja atau karena kebanggaan belaka.

⁷⁷Snouck Hurgronje, *Aceh Dimata Kolonialis*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 99-100.

⁷⁸Snouck Hurgronje, *Aceh Dimata.....*, hlm 102.

Dalam menjalankan pemerintahan mereka mempunyai anggota-anggota yang membantu tugas *Uleebalang* antara lain: *Bantaia* ialah saudara kandung serta kerabat lainnya bertindak sebagai kaki tangan *uleebalang*. *Rakan* atau pembantunya yang berdekatan dengan kediaman *Uleebalang*. *Panglima prang* merupakan pejabat yang rendah jika dilihat secara terpisah secara terpisah senjatanya *Sikin Panyang* serta *Rencong*. *Geucik* dan *teungku* yang tedapat di wilayah *Uleebalang*.

1. Sumber Pendapatan *Uleebalang*

Tiga *Uleebalang* atau panglima sagi utama biasanya menerima hadiah dari raja ketika dia naik tahta. *Jinamenya* sampai 500 ringgit, tetapi bagi panglima sagi yang baru diangkat harus membayar sejumlah uang kepada sultan untuk imbalan atas surat pengangkatan resmi. Disetiap diadakan peristiwa yang penting, ketiga *Uleebalang* utama juga menerima sejumlah hadiah uang dari raja.

Uang denda dikarenakan pelanggaran atau kelalaian lawan hak atau bisa disebut dengan penyitaan tanah sawah. Kemudian uang imbalan dari penyelegaraan pencurian, serta berbagai hasil dari tindakan gelap lainnya. Hak *Uleebalang* juga terdapat di hasil kelautan yaitu sebesar 10 % seperti pengutipan penangkapan ikan menggunakan pukat di daerah *Uleebalang*, adapun ketika rakyat yang berurusan masalah perhutangan kemudian ditagih hutang menggunakan bantuan *Uleebalang* sebagian besar hasil pelunasan hutang ada hak *Uleebalang*.

Berdasarkan pangkat dan jabatan dalam kerajaan Aceh, pendapat *Uleebalang* yang telah tercantum di dalam adat Meukuta Alam ialah pendapatan yang dikutip melalui : *adat blang*/pajak dari sawah, *adat gle*/pajak dari hasil hutan,

adat haria /pajak dari otoritas pasar, *komisi kamsen*/pajak yang berasal dari pedagang kepada *Uleebalang*), *adat wase kuala*/ pajak dari *keujreun* kuala untuk bantuan kapal yang terdampar, *adat lhok*/pajak teluk yang dikenakan pada kapal yang dikutip dari pengunjung pasar, *adat peutoe*/peti (pajak kepada menghadap hakim dengan menyetorkan uang jaminan menurut tata cara), *adat peutua* (adat).⁷⁹Selain sumbangan yang diberikan oleh panglima, para imeum, *keuchiek*, dan lain-lain.

f. Uleebalang pada tragedi perang Aceh

Perang Aceh berlangsung pada 1873 adalah puncak dari persinggungan politik pemerintahan hindia belanda dan Aceh. Kedatangan kapal perang belanda ke pelabuhan Aceh mengindikasikan bahwa kedatangan belanda seharusnya ditakuti pihak aceh karena mereka belum juga mengakui kekuasaan Belanda. Bukannya takut dengan ancaman belanda, pihak aceh justru sudah menyiapkan pasukan yang siap menyerahkan jiwa raga mereka untuk keselamatan tanah airnya.

Pasukan yang gagah perkasa dan senjata dipersiapkan belanda untuk menghadapi pasukan Aceh, Meriam yang dipasang di kapal-kapal belanda menembakkan peluru besar ke daratan untuk membuat panic pasukan Aceh. Begitu sampai didarat pasukan belanda segera mendapatkan serangan dari pihak Aceh. Tidak semua pasukan Aceh pandai menggunakan senapan, jumlah yang tidak banyak tidak membuat semangat pasukan Aceh berkurang walaupun mereka memakai senjata tradisional seperti rencong, pedang, lembing, tombak,

⁷⁹Snouck Hurgronje, *Aceh Dimata*....., hlm. 134-135.

dan klewang. Meskipun senjata aceh kalah modern dengan pihak lawan, bukan berarti mereka mudah dikalahkan. Pasukan aceh berperang dengan brutal karena dibalik itu, mereka menganggap perang mereka sebagai jihad di jalan Allah atau dalam istilah lain dinamakan Perang Sabil.⁸⁰

Belanda mendarat di kuta raja mereka secara langsung berperang di daerah Aceh Besar, banyak *Uleebalang* yang dikalahkan dan kemudian diangkat kembali dengan kekuasaan terbatas, setelah Aceh Besar ditaklukkan Pidie menjadi sasaran kolonial berikutnya, pada tahun 1874 dibuat sebuah perjanjian *Uleebalang* dengan Belanda yang dikenal atas nama *korte verklaring* perjanjian itu dibuat karena *Uleebalang* yang ketakutan akan kekuasaan yang akan dicabut jika terus melawan Belanda.⁸¹ Beberapa *Uleebalang* memilih berdamai dengan menandatangani nota kesepakatan bekerjasama, dimana kaum *Uleebalang* mengakui pendudukan Belanda dan sebaliknya Belanda juga akan mengakui kekuasaan *Uleebalang* atas wilayah yang telah dikuasai *Uleebalang* sejak dulu.⁸²

Sekitar 31 *Uleebalang* yang menandatangani perjanjian dengan Belanda, isi perjanjian tersebut sampai dengan 6 pasal yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengakui raja Belanda sebagai penguasa yang sah dan sebagai tanda bahwa ia tidak akan mengibarkan bendera lain di darat atau di laut kecuali bendera Belanda.

⁸⁰ Ibrahim Alfian, Perang sabil; perang di jalan Allah (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hal 21.

⁸¹ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1992), hlm. 15.

⁸² M. Thamrin Z dan Edy Mulyana, *Perang Kemerdekaan Aceh*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 184.

2. Pemerintah yang memerintah secara adil, memelihara ketertiban dan keamanan dalam negeri dengan negara tetangga, memajukan kemakmuran rakyat, dan melindungi perdagangan, kerajinan, pertanian, dan pelayaran.
3. Dengan sekuat tenaga, melawan perdagangan budak dan melacak pencuri dan peculikan.
4. Mendukung orang yang karam mengalami kerusakan kapal untuk bantu menyimpan barang hingga sampai ke darat, dan tidak akan mengizinkan jika orang tidak mematuhi.
5. Tidak ada perlindungan yang akan diberikan kepada budak di Hindia Belanda yang di hukum karena pelanggaran.
6. Tidak akan menjalin hubungan konstitusional dengan negara asing.

Sebagian *Uleebalang* yang menandatangani perjanjian dengan Belanda, menurut Belanda diantaranya masih ada yang berpura-pura menyerah tetapi masih ada yang membantu sultan dan tetap pada barisan muslimin.⁸³ Setelah *Uleebalang* menandatangani kesepakatan dengan Belanda sekarang *Uleebalang* di sebut “Raja Cilik” di tiap-tiap wilayahnya, diberikan wewenang penuh dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Serta dengan imbalannya diberikan gaji setiap bulannya dan beberapa tunjangan lainnya.

Table. 3.1 Sumber: Said Abubakar

Uleebalang di pantai barat selatan Aceh yang menandatangani *korte Verklaring* Periode pertama.⁸⁴

⁸³ Teuku Ibrahim, *Wajah Aceh dalam Lintas Sejarah*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2014), hlm. 94.

No	Nama <i>Uleebalang</i>	<i>Landschap</i>	Tanda Penandatanganan	Tanggal Pengukuhan
1	Datok Baginda	Susoh	28-2-1874	24-7-1875
2	Teuku Nyak Sawang (gelar raja)	Pulau Kayu dan Blang Pidie	9-3-1874	24-7-1875
3	Datok Ujong Batee	Labuhan Haji	6-3-1874	24-7-1875
4	Datok Cut Amat	Meukek	6-3-1874	24-7-1875
5	Cut Ma Fatimah	Terbangan	11-3-1874	24-7-1875
6	Sri Muda Paduka Alam	Trumon	29-4-1874	24-7-1875
7	Datok Raja Amat	Tapaktuan	5-5-1874	24-7-1875

Bidang Eksekutif *Uleebalang* yang telah menandatangani perjanjian berhak memerintah sebagai wakil belanda di tiap-tiap daerahnya. Bidang legislatif dijalankan berdasarkan adat istiadat sedangkan bidang yudikatif dibentuk lembaga peradilan yang disebut *landschaapsrecht* memiliki wewenang menjatuhkan hukuman apa saja kepada siapa saja yang tidak disukainya, tidak hanya dibidang sipil dan kepidanaan, akan tetapi bidang keagamaan mencakup masalah nikah, pasah, talak dan rujuk. Serta lembaga peradilan yang cukup luas dikuasai oleh *Uleebalang*.

⁸⁴Said Abu Bakar, *Berjuang Untuk Daerah*, (Banda Aceh: Yayasan Naga Sakti, 1994), hlm. 155.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesultanan Aceh merupakan kerajaan dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, oleh karena itu dibutuhkan anggota yang mendukung pemerintahan kerajaan untuk memperpanjang kekuasaan atau pejabat kesultanan Aceh, banyak urusan pemerintahan dan urusan di bidang lainnya yang kemudian diserahkan sepenuhnya kepada *Uleebalang*, memberikan mereka otonomi yang luar biasa. *Uleebalang* yang menerima cap sultan atau cap *sikureung* sebagai pengakuan atas posisinya di *nanggroe*.

Uleebalang adalah bawahan sultan Aceh, diangkat untuk membantu tugas kesultanan. *Uleebalang* memiliki wilayah yang dikelola sendiri sehingga menjelma menjadi raja-raja kecil. Pada paruh terakhir abad ke 19, struktur masyarakat Aceh masih dalam polarisasi adanya kepemimpinan adat dan agama. Nilai adat menjadi urusan sultan dan *Uleebalang*, maka agama merupakan wilayah dari ulama. Kekuasaan *Uleebalang* yang diperoleh secara turun temurun itu disebut *nanggroe* (negeri) dengan wilayah dan penduduk yang berbeda beda. *Uleebalang* memiliki wewenang untuk menjaga agama Islam dan menciptakan suasana kondusif.

Di Aceh, *Uleebalang* menjabat sebagai panglima tentara dan juga ditugaskan oleh penguasa Aceh untuk memimpin *nanggroe* atau negara. Dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan mereka ialah mereka di ibaratkan sebagai “raja kecil” yang memerintah sebuah *nanggroe*, negara, *landschap*, atau kerajaan

kecil. *Uleebalang* menyandang gelar *teuku* (gelar untuk pria) dan *cut* (gelar untuk wanita), dan mereka dikenal sebagai *Uleebalang* dalam pemerintahan Mukim.

Uleebalang bertugas sebagai pemungut *wasee* di pelabuhan wilayah kekuasaannya. Pemungutan bea ekspor dan impor *wasee*, mereka yang mengendalikan lalu lintas ekspor dan impor melalui jalan darat dan pelabuhan listrik, pajak irigasi, dan beberapa pajak tanah merupakan sumber pendapatan bagi *Uleebalang*. Partisipasi utama *Uleebalang* dalam perdagangan yang memperkuat status mereka di daerah.

Kehidupan sosial antara *Uleebalang* dengan rakyat juga terlibat dalam urusan hukum Islam, seperti nikah, talak, rujuk, dan lain sebagainya. Dalam pembagian harta pusaka juga dilakukan di pengadilan *Uleebalang*, *Uleebalang* sangat berpengaruh dalam pertahanan kerajaan di masa kolonial Belanda ingin menyingkirkan kekuasaan kesultanan. Para *Uleebalang* dan ulama yang menjadi pendukung setia sultan, tetap menjalankan perlawanan terhadap pihak Belanda, yang di mana pada saat itu kedudukan sultan semakin hari semakin terpinggirkan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan keturunan dari sultan lebih memilih sikap yang netral.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyampaikan beberapa saran mengenai peran *Uleebalang* dalam penguatan sosial ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam 1873-1942. Penelitian merasa akan penting pengetahuan tentang sejarah kekuasaan Kerajaan Aceh khususnya mengenai kekuasaan *Uleebalang*.

Oleh karena itu, dengan tulisan tentang sejarah kekuasaan daerah ini diharapkan kepada pihak yang terkait terutama pemerintahan Aceh supaya lebih memperhatikan system pemerintahan pada masa sekarang. Begitu pula dengan masyarakat diharapkan agar lebih mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setempat.

Peneliti juga berharap kepada pemerintah Aceh agar kedepannya selalu menjadi pelindungan bagi rakyat dan juga bagi kehidupan ekonomi sosial kehidupan masyarakat, senantiasa rakyat merasa tentram dan aman sentosa dengan pemimpin yang adil serta yang patuh akan peraturan-peraturan daerahnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aam Abdillah. *Pengantar Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Aboe Bakar. dkk. *Kamus Aceh Indonesia 2*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka. 1985.
- A. Hasjmy. *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Ali Hasjmy. *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1983.
- Antom M. Moeliona dan Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Antony Reid. *Asal Mula Konflik Aceh*, Penerj. Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005.
- _____. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*. Penerj, Anonymous. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1987.
- A. Rani Usman. *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003.
- Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*. Bandung: Mizan. 1994.
- Biyanto. *Teori Siklus Peradaban*. Surabaya: LPAM. 2004.
- Denys Lombard. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda*. Terjemahan Arifin Winnarsih. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.
- Eka Sri Mulyani. dkk. *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. 2018.
- I. C. Zentgraaff. *Aceh*. Jakarta Pusat: Beuna. 1983.
- Hasan Saleh. *Mengapa Aceh Bergolak*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti. 1992.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2001.
- Hasbullah. *Uleebalang: Dari Ke Sultanatan Hingga Revolusi Sosial*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh. 2015.

- Fathur Rahman. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press. 2018.
- Ibrahim Alfian. *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Hasil-hasil Penelitian dengan Metode Ground Research. Jakarta: L P3ES. 1997.
- Jame T. Siegel. *The Rope Of God*. Berkeley Add Angeles: University Of California Press. 1996.
- John Anderson. *Acheen and The Port On The Nort And Coast Of Sumatra*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- K.F.H.Van Lange. *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*. Alih Bahasa: Aboe Bakar, pusat Dokumentasi dan informasi Aceh. Banda Aceh. 2002.
- LK.Are. *Ensiklopedi Aceh: Adat Hikayat dan Sastra*. Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih. 2008.
- M. Gade Ismail. “*Seneubok Lada*”. Disertai Belum Diterbitkan Leiden. 1991.
- M. Hasan Basry, *Kamus umum Indonesia- Aceh*. Jakarta: Yayasan Cakra Daru. 1994.
- Misri A. Muchsin. *Filsafat Sejarah dalam Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press. 2002.
- Moehammad Hoesein. *Adat Atjeh*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 1970.
- Muhammad Ibrahim. *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta. 1991.
- M. Thamrin Z dan Edy Mulyana. *Perang Kemerdekaan Aceh*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. 2007.
- M. Zainuddin. *Singa Atjeh*. Medan: Pustaka Iskandar Muda. 1957.
- Paul Van ‘T Veer. *Perang Aceh Kegagalan Snouck Hurgronje*. Jakarta: PT. Grafiti Pers. 1985.
- R.A Hoesein Djajadiningrat. “*Critisch Overzicht Van De In Maleische Werken Vervatte Gegevents Over De Geschiedenis Van Het Soeltanaaat Van Atjeh*”. dalam *BKI* 65. 191.
- Rizem Aizid. *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*. Yogyakarta: Diva Press. 2015.

- R. Mohammad Ali. *Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara*. Jakarta: Bhratara. 1963.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar. 1998
- Snouck Hurgronje. *Aceh di Mata Kolonialis*. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. 2014.
- Said Abu Bakar. *Berjuang Untuk Daerah*. Banda Aceh: Yayasan Naga Sakti. 1994.
- Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia. 1992.
- Snouck Hurgronje. *Aceh Dimata Kolonialis*. Terj. Ng. Singarimbun, dkk. Jakarta: Yayasan Soko Guru. 1985.
- Sudirman. *Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional 1500-1800*. Banda Aceh: Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional. 2009.
- _____. *Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional 1500-1873*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Research & Devolement*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- T.I. El Hakimi. “Beberapa Segi Hukum Adat Tentang Tanah Pedesaan”. Penelitian Rral Developmeny Center. Syiah Kuala. Banda Aceh. 1981.
- Tuanku Abdul Jalil. *Adat Meukuta Alam*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1991.
- Teuku Ibrahim Alfian. “Banda Aceh Sebagai Pusat Awal Perang di Jalan Allah”. dalam *Kota Banda Aceh Hampir 1000 Tahun*. Banda Aceh: Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. 1988.
- Teuku Ibrahim. *Wajah Aceh dalam Lintas Sejarah*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 2014.
- Teuku Mohammad Isa. *Dari Aceh Ke Pemersatuan Bangsa*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 1999.
- Tengku Puteh. *Sistem Perpajakan dan Keuangan Kerajaan Aceh Darussalam*. Posted On 14 Agustus 2020.
- Zakaria Ahmad. *Sekitar Kerajaan Atjeh dalam Tahun 1550-1675*. Medan: Monora. 1972.

Sumber Website:

Di Meulek. *Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda*. Naskah Disimpan di Museum Ali Hasjmy Banda Aceh.

Pemerintahan Aceh. *Tengku Panglima Polem*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh.2022.

<http://mirror.acehprov.go.id/jelajah/read/2013/10/02/19/teuku-panglima-polem.html>.

<https://www.editpad.org/tool/id/paraphrasing-tool>

Tita Putu. Sejarah Kerajaan Islam Kesultanan Aceh Darussalam.[https://www.academia.edu/34068722/Sejarah Kerajaan Islam Kesultanan Aceh Darussalam](https://www.academia.edu/34068722/Sejarah_Kerajaan_Islam_Kesultanan_Aceh_Darussalam)



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri:

Nama : Rita Ellyanda
Tempat/Tgl. Lahir : Piyeung Datu, 27 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 180501061
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
No. Hp : 082269133916
Email : ritaellyanda00@gmail.com

2. Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Abdullah
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Ellyzar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Piyeung Datu, Kec. Montasik, Kab.Aceh Besar

3. Riwayat Pendidikan:

- a. Sekolah Dasar : SDN 15 Aceh Besar, tamat tahun 2011
- b. SLTP : SMPN 3 Montasik, tamat 2013
- c. SMA : SMAN 1 Montasik, tamat 2018
- d. Perguruan Tinggi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, masuk tahun 2018.

Darussalam, 25 November 2022

Rita Ellyanda